UNS Tower: Krisis Urgensi di Tengah Pandemi

KENTINGAN

DETAK NURANI MAHASISWA

Majalah Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta / ISSN: 1410-4664 / Edisi 28 Tahun 2021

WAJAH PENDIDIKAN ALA PTN-BH

Menilik Kerangka Baru Kampus Kita setelah Satu Tahun Lebih Menyandang PTN-BH

KIRIM TULISANMU!

Untuk mencicil utang pada kata-kata, redaksi menerima pembaca yang ingin mengirimkan tulisan ke *saluransebelas.com*

Catatan Kentingan:

- Opini
- Surat Pembaca

Resensi:

- Film
- Musik
- Buku

Ruang Sastra:

- Puisi
- Cerpen

Ketentuan selengkapnya dapat dilihat di:
saluransebelas.com/kirim-tulisanmu/

Perubahan

Edisi Sebelumnya

Redaksi LPM Kentingan
Gd. Graha UKM UNS Lt. 2, Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan, Jebres, Kota Surakarta

Surel: email@saluransebelas.com
Laman: saluransebelas.com

Selamat datang di kampus kami! Kampus biru yang sedang mengalami banyak hal baru. Perubahan baru yang menggegerkan khalayak tersebut muncul setelah dinobatkannya Universitas Sebelas Maret menjadi PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum).

Dalam pelaksanaannya, perubahan-perubahan itu banyak menuai pro dan kontra. Mengapa? Karena dengan otonomi penuh, suatu Perguruan Tinggi Negeri dapat secara mandiri mengelola rumah tangganya. Husnuzannya, dengan hal itu diharapkan perguruan tinggi bisa lebih cepat berkembang dan berinovasi. Sementara suuzannya, pengelolaan keuangan secara mandiri (pemerintah akan mengurangi dana subsidi PTN) membuat PTN mau tidak mau mencari dana dari mahasiswanya. Mungkin pula, PTN harus rela dimasuki oleh korporasi, membangun *ini itu.*

Mungkin, ada sesuatu-sesuatu di kampus biru yang belum banyak orang tahu, bahkan para penghuninya sekali pun. *Kamu, iya, kamu*! Sedikit abu-abu, ada apa gerangan dengan kampus tercintaku? Melalui Majalah Kentingan ini, kalian diajak untuk mengeksplorasi dan mendapat informasi dari kampus sendiri. Dimulai dari kegelisahan mengenai komersialisasi dan militerisasi kampus, polemik yang sedang terjadi antara MWA UM, sampai dengan apa sih itu bangunan tinggi nan megah yang menyapa kalian ketika masuk gerbang? Jika penasaran, mari kita cari tahu bersama-sama. Siap tuk menjelah? Selamat membaca!

Penerbit: LPM Kentingan UNS; **Pelindung**: Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.; **Pembina**: Sri Hastartjo, S.Sos., Ph.D.; **Pemimpin Umum**: Hesty Safitri; **Sekretaris Umum**: Dinda Amalia Fatika Az Zahra; **Pemimpin Perusahaan**: Ahya Qisti Firlana; **Pemimpin Redaksi**: Muhammad Wildan Fathurrohman; **Pemimpin PSDM**: Afika Permata Ilma.

Penerbitan Majalah Kentingan Edisi XXVIII 2021: **Redaktur Pelaksana Majalah**: Ardini Ainnur Ridha; **Reporter**: Dita Audina Suyanto, Tuffahati Athallah, Aulia Anjani, Muchammad Achmad Afifuddin, Sabila Soraya Dewi, Hesty Safitri, Atif Kasful Haq, Alisya Zahna Fadila, Annisa Khusna Amalia, Andriana Sulistiyowati, Michelle Eugene Zalika Mukarim, Muhammad Wildan Fathurrohman, Rizky Nur Fadilah, Guireva Gahara Nugrahasti, Muhibah Syifa Awalia Rosasi, Jasmine Putri Lintang Sagara Dewi, Afika Permata Ilma, Rama Mauliddian Panuluh, Tamara Diva Kamila, Zulfaa Afiifah; **Fotografer**: Carelya Griselda, Raihan Musthafa A, Khaira Fadia Thoriq, Ayu Meliana Sari, Riza Noermala Putri, Rozaq Nur Hidayat; **Riset**: Ellen Pramesti Wijaya, Reva Amudyana Dewayani; **Ilustrator**: Rizky Setiawan, Muhammad Fakhrur Rozzi, Muhammad Luqmansyah, Sheilla Fitri Honey W, Azzahra H, Muhammad Ilham Al Basyari, Raulliano Bagus Aguiera, Rudiyaningsih, Hafiz Norman; **Penata Letak**: Muhammad Ilham Al Basyari.

Daftar Isi

BENGKEL REDAKSI |3

DAFTAR ISI |4

ANGKRINGAN |5

CERMIN |6

EDITORIAL |7
- Satu Tahun PTN-BH

FOKUS UTAMA |8
- Status PTN-BH untuk UNS, Otorisasi atau Komersialisasi?
- UNS Tower: Krisis Urgensi di Tengah Pandemi
- Militer Masuk Kampus, Sopankah Begitu?

RISET |22
- SPI UNS Semakin Tinggi, Sarana dan Prasarana Pendidikan Belum Terpenuhi

TEMPO DOELOE |25
- Kompas Pendidikan Tinggi Kita Rusak

KOLOM |26
- Merindukan Kelas
- Jalan Pendidikan Kita yang Meresahkan

DESTINASI |30
- D'Sobahan Resort: Taman Bermain Berpadu Penginapan

ALUMNI YANG LULUS |33

PHOTO STORY |34
- Menilik Pembangunan Tower UNS: Menara 11 Lantai

LAPORAN KHUSUS |38
- Masih Adakah yang Mengganjal dalam Benak Mahasiswa Terkait MWA UM UNS?

SEKITAR KITA |42
- Bus Kampus dalam *Green Campus*

TREN |45
- Predikat Kampus Hijau dan Tanggung Jawabnya

INOVASI |48
- *TikTok Life Hack Campus: Innovative and Efficient* Cara Cepat untuk Mempersingkat Alur Suatu Proses

BENTARA |50
- Kampus Inklusi: Sudahkah Ramah bagi Mahasiswa Difabel?

SOSOK |52
- Butet Manurung: Pendidikan untuk Siapa?

PENTAS |55
- Alun Lincah Kidang Bocah

GALERI |57
- Puisi: Dualisme
- Cerpen: Academia Pragmatismus

RESENSI |61
- The Stranger: Orang Asing di Dunia Sendiri
- Ketika Universitas Menjadi Suatu Komoditas
- Harapan Tetap Mekar di Tengah Badai Kekacauan

CATATAN KAKI |69
- Kiblat Status Baru Kampus

Kesenjangan Pengetahuan

Oleh: Muhamad Deni Setiawan, Sastra Indonesia FIB UNS (2018)

"Academia has become a servant of the status quo. Its malaise runs so much deeper than tuition fees." –Terry Eagleton

Saya merasa bahwa isu pendidikan—terutama di UNS—belum begitu ditanggapi secara mendalam. *Pertama,* karena isu ini sering kali gaungnya tidak sebesar isu-isu lain; agraria, pekerja, HAM (Hak Asasi Manusia), dll. *Kedua,* permasalahan pendidikan yang ada di tubuh *civitas academica* UNS saat ini tidak memiliki ruang yang cukup luas untuk didiskusikan dan dirumuskan arah geraknya.

Kajian-kajian yang dibuat oleh BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) se-UNS hanya sebatas disebarkan tanpa ada langkah-langkah konkret lebih lanjut. Misalnya, memperbanyak acara diskusi maupun menggandeng ormawa lain untuk ikut menggodok dan menyebarkannya.

Ketimpangan pengetahuan akan permasalahan kampus pun makin melebar. Gerakan mengenai isu ini pada akhirnya hanya bergantung kepada ormawa tertentu (baca: BEM).

Contohnya adalah mengenai peran MWA UNS-UM (Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa). Satu-satunya hal yang saya ketahui tentang MWA UNS-UM adalah posisinya yang diwakili oleh Presiden BEM UNS. Mengenai sistem pemilihannya seperti apa, alasan kenapa diwakili oleh Presiden BEM UNS, dan berbagai hal lain tentangnya tidak saya ketahui.

Sederhananya, diskursus terhadapnya bersifat eksklusif—asumsi saya ini tentu dapat diperdebatkan. Oleh karena itu, saya kira, upaya untuk mendorong perubahan kebijakan harus dimulai dari perbaikan konsep gerakan.

Ilustrasi: Rizky Setiawan

Ilustrasi: Azzahra H

SATU TAHUN PTN-BH

Oktober tahun lalu, UNS bersukacita. Perjuangan selama sekitar empat tahun meraih status PTN-BH terbayar sudah. Kini embel-embel PTN-BH bukan sekadar bentuk antusiasme saja, tetapi sebuah pencapaian yang dibanggakan.

Meskipun perayaan status baru UNS sempat teredam dari telinga mahasiswanya oleh kesunyian Covid-19, nyatanya beberapa isu muncul dan mulai menarik perhatian. Mulai dari isu komersialisasi pendidikan, masuknya militer sebagai Majelis Wali Amanat (MWA), pembangunan UNS Tower dan SPBU, kuota penerimaan mahasiswa baru, hilangnya Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Rp0 bagi mahasiswa baru, dan isu-isu lain yang meresahkan mahasiswa. Rupanya, perjuangan UNS mencapai status barunya itu tak juga mendapat sambutan sukacita dari mahasiswanya.

Berbicara tentang PTN-BH, kebijakan ini mengusung konsep di mana perguruan tinggi dipersilakan untuk mengatur anggaran rumah tangga dan keuangannya sendiri. Kampus diberi kebebasan untuk mencari dana tambahan dalam menjalankan aktivitasnya, seperti pembangunan infrastruktur, pembayaran listrik dan air, gaji dosen dan pegawai, dan lain-lain. Selain kebebasan mengatur keuangan, masih ada iming-iming yang ditawarkan PTN-BH, seperti keluasan untuk bermitra dengan pihak industri, kebebasan untuk membuka prodi baru, kebebasan untuk mengangkat dosen dan tenaga kependidikan non-PNS, kepemilikan aset penuh, serta kebebasan untuk mengembangkan fasilitas akademik dan nonakademik secara mandiri. Keuntungan tersebut tampaknya menjadi alasan hampir semua kampus berlomba-lomba bermetamorfosis menjadi PTN-BH.

PTN-BH memang menjadi keuntungan tersendiri untuk sebuah kampus. Namun, di sisi lain ada risiko yang perlu dipertimbangkan. Pemahaman "otonomi" keuangan menjadi kebebasan "tanpa batas" untuk mengelola keuangan menimbulkan prasangka bagi beberapa pihak, khususnya mahasiswa. Status baru PTN-BH untuk beberapa perguruan tinggi di Indonesia banyak menuai kontroversi di lingkungan akademisi maupun masyarakat. Banyak pihak menganggap status PTN-BH sebagai karpet merah menuju komersialisasi pendidikan. Seperti halnya, Darmaningtyas di bukunya yang berjudul *Melawan Liberalisasi Pendidikan Tinggi* yang menganggap PTN-BH sebagai bentuk bergesernya paradigma pendidikan kearah komersialisasi yang kapitalistik.

Satu tahun berlalu dan keresahan pun tak kunjung padam. Apa yang kita takutkan –meminjam istilah yang digunakan sosiolog George Ritzer– bahwa tengah terjadi *McDonaldisasi* di sistem pendidikan kita hari ini.

Ilustrasi: Muhammad Luqmansyah

Status PTN-BH untuk UNS, Otorisasi atau Komersialisasi?

Oleh: Dita Audina dan Tuffahati Athallah

Akhir-akhir ini, program Kampus Merdeka –Merdeka Belajar merebak di kalangan pelajar dan pengajar. Kampus Merdeka merupakan konsep baru yang membebaskan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini adalah lanjutan dari konsep sebelumnya yakni Merdeka Belajar yang diusung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim. Konsep Kampus Merdeka dilangsungkan untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas guna menciptakan SDM yang lebih unggul. Dalam Kampus Merdeka, terdapat empat kebijakan *ala* Nadiem Makarim, salah satunya adalah mengubah PTN Satker menjadi PTN-BH.

Sebelumnya, perlu kita ulik terlebih dahulu apa itu PTN-BH dan bagaimana sejarahnya sebelum berbicara mengenai status PTN-BH yang baru ini didapatkan UNS. PTN-BH atau Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum adalah perguruan tinggi yang memiliki otonomi penuh akan pengaturan anggaran rumah tangga dan keuangan. Pemerintah akan lepas tangan dari pemantauan terhadap catatan keuangan yang dimiliki perguruan tinggi tersebut. Ini artinya, sebuah PTN akan menjadi bebas dalam menentukan pemasukan dan pengeluaran serta penganggaran kebutuhan universitas.

Sejarah PTN Berbadan Hukum

Dikutip dari *Modul Kajian Kampus Merdeka* milik Universitas Padjajaran, awal mula sejarah PTN-BH adalah pascareformasi 20 Mei 1998. Pada waktu itu, Presiden Sementara Indonesia B.J. Habibie mengeluarkan PP Nomor 61 Tahun 1999 mengenai Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum. Setelah keluarnya peraturan ini, lambat laun PTN berubah menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PTBHMN). Kemudian, muncul polemik dalam masyarakat sebagai protes terhadap mahalnya biaya pendidikan jenjang tinggi, terlebih Indonesia baru saja mengalami masa transisi setelah krisis moneter.

Tak jarang masyarakat menganggap bahwa ini merupakan tanda bahwa pemerintah abai dan tidak acuh terhadap urusan keuangan dalam instansi pendidikan. Hal ini membuat perguruan tinggi menjadi lebih mudah dikomersialkan. Akan tetapi, sebagian masyarakat mendukung adanya pemberian status PTBHMN ini karena dianggap sebagai gerakan demokratisasi dan pemberian otonomi secara penuh dan mandiri kepada perguruan tinggi negeri. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu terlalu mencampuri urusan pendidikan tinggi.

Di tengah banyaknya pendapat masyarakat yang masuk mengenai PTBHMN, proses pengesahan terus berlanjut. Pemerintah tetap mendorong agar PTN berlomba untuk bertransformasi menjadi PTBHMN. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 53 yang mengamanatkan semua lembaga pendidikan berbadan hukum. Diperjelasnya implementasi mengenai lembaga pendidikan berbadan hukum ditandai dengan disahkannya UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan serta dikeluarkannya PP No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. Kendati demikian, kritik masyarakat mengenai privatisasi dan komersialisasi pendidikan tidak berhenti. Hal ini disebut privatisasi karena pemerintah dianggap memberikan otonomi ekonomi sepenuhnya. Keuangan kampus yang semula diurus BUMN menjadi diurus oleh pengelola kampus secara perseorangan.

Melihat hal tersebut, masyarakat mengajukan *judicial review* atau permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terhadap UU Nomor 9 Tahun 2009 dengan alasan tidak sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait pendidikan harus dapat dijangkau oleh seluruh pihak tanpa terkecuali. Permohonan itu diterima oleh MK dan UU tersebut dibatalkan.

Akan tetapi, setelah dibatalkannya UU Nomor 9 Tahun 2009, dikeluarkanlah undang-undang baru, yaitu UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dengan substansi yang tidak jauh berbeda. Setelah itu, disusul dengan PP Nomor 58 Tahun 2013. Hal ini menjawab tanda tanya di masyarakat terkait urusan otonomi perekonomian kampus. Status PTN-BH ini dianggap memberikan keuntungan bagi kampus karena dapat melepaskan diri dari urusan birokrasi pemerintah yang sering menghambat kemajuan perguruan tinggi negeri. PTN dengan status badan hukum pun dapat dengan mandiri mengurus bidang akademik dan nonakademik. Hal ini berarti meskipun sebuah PTN badan hukum diberikan otonomi dan hak penuh dalam mengelola keuangan dan menyelenggarakan pendidikan, status kepemilikan yang ada bukanlah milik perseorangan, melainkan masih menjadi milik negara. Dengan demikian, negara masih bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengontrol kemajuan PTN tersebut.

Dalam kebijakan Kemendikbud, salah satu contoh implementasi Kampus Merdeka adalah dengan mengubah PTN Satker menjadi PTN-BH. PTN Satker merupakan perguruan tinggi negeri dengan status sebagai satuan kerja, di mana di dalamnya disediakan layanan umum. Perubahan tersebut dilakukan karena adanya tuntutan zaman yang bergerak begitu cepat. Namun selain berkaitan dengan kompetisi di panggung dunia, status yang didapatkan ini berkaitan dengan adanya keleluasaan pihak kampus yang ditakutkan akan menjadi celah untuk melakukan komersialisasi.

Kenaikan Status UNS sebagai PTN-BH

Universitas Sebelas Maret (UNS) adalah salah satu universitas negeri di Indonesia yang sudah menyandang status Kampus Merdeka, menyusul ITB, UGM, UI, dan 8 universitas lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020. Status PTN-BH yang diraih UNS pada tanggal 6 Oktober 2020 lalu tentu tidak dengan mudah didapatkan. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebuah perguruan tinggi negeri apabila ingin menyandang status PTN-BH. Dijelaskan dalam Pasal 2 Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 bahwa PTN-BH harus mencakup lima hal pokok sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu;
2. Mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik;
3. Memenuhi standar minimum kelayakan finansial;
4. Menjalankan tanggung jawab sosial; dan
5. Berperan dalam pembangunan perekonomian.

Terpenuhinya lima hal pokok tersebut menjadikan suatu perguruan tinggi negeri dapat mencapai status tertinggi dalam sebuah

instansi pendidikan dan hal itu diraih oleh Universitas Sebelas Maret pada usia yang dapat dikatakan cukup muda, yaitu sekitar usia 44–45 tahun sejak berdirinya pada 11 Maret 1976.

Dilansir dari Kompas, terkait naiknya status UNS sebagai PTN berbadan hukum dijabarkan sendiri oleh Rektor UNS Jamal Wiwoho melalui wawancara pada kanal YouTube UNS dengan tajuk *Ngobrol Santai Akhir Tahun Mengulik PTN-BH UNS* pada 31 Desember 2020 silam. Delapan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi yang diputuskan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754-P-2020 ini dimiliki oleh UNS. Kepemilikan tersebut menjadi nilai tambah yang turut membantu meningkatkan skor universitas dalam peringkat internasional *World Class University*. Delapan indikator yang dimaksud tersebut adalah

1. Lulusan mendapat pekerjaan yang layak;
2. Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus;
3. Dosen berkegiatan di luar kampus;
4. Praktisi mengajar di dalam kampus;
5. Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat;
6. Program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia;
7. Kelas yang kolaboratif dan partisipatif;
8. Program studi berstandar internasional.

Terlepas dari berita-berita miring terkait komersialisasi kampus, Jamal menampiknya dengan tenang. Menurut beliau, otorisasi keuangan yang diberikan kepada kampus tidak memberatkan mahasiswa. Hal ini dikarenakan urusan terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau uang semester mahasiswa dapat diangsur, ditunda, dikurangi, bahkan dihapuskan apabila sang mahasiswa merasa keberatan, tetapi tentu saja dengan syarat-syarat tertentu. Beliau juga menuturkan, UNS wajib menerima mahasiswa yang menggunakan fasilitas Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 20% agar teman-teman mahasiswa yang kurang beruntung tetap dapat merasakan berkuliah.

Suara dari Pihak Mahasiswa

Di tengah euforia peningkatan status UNS menjadi PTN-BH, kecaman keras dari mahasiswa justru disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS seperti yang tertera di Instagram *@bemuns* pada April 2021 lalu. Unggahan Instagram TV (IGTV) itu menyatakan bahwa wewenang yang didapatkan UNS terkait pengelolaan finansial dapat merugikan mahasiswa dan membuat mahasiswa menanggung kekurangan kemampuan kampus dalam perekonomiannya.

Pada tanggal 8 Juli, dilakukanlah wawancara dengan Presiden BEM UNS 2020/2021, Zakky Musthofa Zuhad. Menurutnya, bahasan pokok yang menjadi perjuangan teman-teman mahasiswa adalah adanya komersialisasi pendidikan yang memberikan beban lebih kepada masyarakat. Bukannya semakin mengusahakan akses pendidikan yang terjangkau bahkan gratis, kampus malah memberikan kebijakan-kebijakan baru yang tidak berpihak pada mahasiswa. Beberapa ketakutan mahasiswa pada status PTN-BH dirangkum sebagai berikut.

Pertama, status PTN-BH ditakutkan akan mengurangi subsidi pemerintah untuk universitas. Meskipun urusan finansial diatur secara mandiri, tetapi tetap harus adil dalam meningkatkan akses pendidikan untuk warga negara. Dengan demikian, pemerintah tidak boleh lepas tangan. Sebelum menjadi PTN-BH, UNS masih menyediakan pilihan uang gedung 0 rupiah untuk pendaftar jalur Mandiri. Akan tetapi, pilihan itu dihapuskan dan diganti dengan minimal SPI sebesar 5 juta rupiah setelah UNS menjadi PTN-BH. Secara tidak langsung, orang yang masuk jalur Mandiri dipaksakan dan dituntut untuk membayar SPI atau uang pangkal. Padahal dalam undang-undang, SPI bersifat sukarela seperti halnya infak. Adanya kewajiban SPI membuat sebagian orang enggan berkuliah.

Kedua, kuota jalur Mandiri (Seleksi Mandiri UNS) sekarang 45% dari rencana awal 50%. Pihak BEM UNS sudah memperjuangkan supaya maksimal kuota Mandiri menjadi 30%, tetapi hanya dikurangi 5% menjadi 45%. Dengan demikian, dapat diasumsikan kalau jalur Mandiri ini jalur mencari uang, padahal di UU sudah dijelaskan bahwa SPI itu sukarela.

Ketiga, melihat dari gelombang kedua jalur Mandiri (SM UNS) yang sifatnya tidak transparan, bisa diasumsikan bahwa gelombang kedua ini dimanfaatkan untuk mengisi ruang kosong di SNMPTN dan SBMPTN. Dengan jalur Mandiri ini, calon mahasiswa menggadaikan nilainya dengan membayar SPI yang ditentukan kampus, sungguh sangat disayangkan. Kemudian, muncullah pertanyaan, sebenarnya sistem SPI ini berpihak pada mahasiswa atau tidak?

Zakky menilai bahwa penggantian status UNS menjadi PTN-BH sama sekali belum membawa UNS menuju arah yang lebih baik, baik itu dari segi akademik maupun administratif. Ia mengibaratkan status PTN-BH seperti menjadikan pengurus kampus sebagai sang pemilik kampus, karena merekalah yang mengatur pembangunan dalam kampus. Hal yang menakutkan, di undang-undang PTN-BH diperbolehkan menaikkan kuota jalur Mandiri sampai 50%, sedangkan di BLU hanya sampai 30%. Pada kenyataannya, mahasiswa sendiri tidak diberikan transparansi mengenai laporan operasional terkait badan usaha apa saja yang mendanai kegiatan di UNS. Keberadaan SPBU dalam kampus pun dinilai sepi. Baginya, PTN yang sekiranya sudah menjalankan kebijakan PTN-BH dengan baik dan dapat menjadi contoh adalah IPB, UI, dan UGM.

Mengingat usia UNS yang terbilang cukup muda dalam meraih pencapaian status baru, bagi Zakky pribadi, UNS belum layak dalam mengemban amanah menjadi PTN-BH. Oleh pemerintah, kampus didorong untuk kemandirian finansial, tetapi yang terjadi adalah ketidaksiapan dari pihak kampus sendiri. Mengingat perlunya kebutuhan untuk membiayai kegiatan kampus, kampus menjadi lebih fokus mencari uang daripada mengembangkan urusan akademik dan administratif di dalamnya. Zakky turut membahas mengenai penggunaan fasilitas yang dibayarkan melalui SPI mahasiswa. Menurutnya, seharusnya fasilitas UNS dapat secara langsung dirasakan oleh mereka yang membayar. Ia mencontohkan tahun ini ada pembangunan sebuah gedung dengan menggunakan SPI mahasiswa. Akan tetapi, mahasiswa yang membayar SPI tersebut sudah lulus terlebih dahulu dan tidak merasakan sama sekali fasilitas yang dibangun itu. Padahal, hakikat SPI adalah sama seperti uang pembangunan untuk gedung yang dibayarkan sekali selama satu periode masa perkuliahan. Dengan demikian, seharusnya mahasiswa dapat merasakan apa yang mereka bayarkan.

Pernyataan hampir senada terlontar dari M. Aminullah Thohir yang akrab disapa Amin, seorang mahasiswa FISIP UNS. "Kalau aku tidak percaya kampus menjadi baik ketika menjadi PTN-BH. Menurutku, kampus menuju yang baik adalah di mana kampus itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat dari golongan bawah sekali pun," ungkapnya. Menurut Amin, pendidikan haruslah membawa masyarakat kepada perubahan yang lebih baik. Dengan adanya kebijakan dari PTN-BH, biaya berkuliah akan semakin mahal.

Selain permasalahan kebijakan finansial, masih terdapat beberapa masalah internal yang menurut Amin menjadikan UNS belum siap atau bahkan tidak cocok menyandang status PTN-BH. Salah satunya adalah ia menilai bahwa pihak kampus masih belum terlalu peduli dengan permasalahan yang ada di kalangan dosen. "Ini enggak ada kaitannya sama kebijakan PTN-BH, lebih ke penguasaan teoretis dan praktik dosen. Dari yang kuketahui secara singkat, banyak dosen yang diterima penelitiannya oleh LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) justru sering memanfaatkan mahasiswanya untuk mengerjakan penelitiannya. Sementara dosen yang punya integritas tinggi, secara teoretis dan praktik bagus, penelitiannya malah ditolak tanpa adanya catatan reviu. Untuk mengetahui lebih lanjut, mungkin bisa wawancara langsung kepada dosen," ujarnya. Akan lebih baik apabila kampus memfokuskan diri terlebih dahulu kepada isu internal yang ada sebelum menjadi PTN berbadan hukum.

Sebagai penutup, Zakky selaku Presiden BEM UNS menyampaikan harapannya terkait isu ini. Ia berharap kampus tidak menaikkan jumlah besaran UKT walaupun sudah beralih status menjadi PTN-BH seperti yang sudah dijanjikan Jamal ketika menjabat menjadi Rektor UNS. Ia ingin dapat terus mengawal permasalahan terkait SPI, UKT, dan kebijakan yang merugikan mahasiswa.

"Perubahan baik apa yang terjadi ketika masyarakat di sekitar UNS saja tidak mampu berkuliah di UNS karena biaya (SPI) yang sangat mahal?" ujar Amin.

Gambar: Raihan Musthafa A

UNS Tower: Krisis Urgensi di Tengah Pandemi

Oleh: Aulia Anjani

Kronologis Terciptanya Kebijakan Pembangunan UNS Tower

Bulan Oktober 2020, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2020 menetapkan Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai 1 dari 12 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) di Indonesia. Dengan disematkannya status PTN-BH diharapkan dapat mempermudah jalan untuk mencapai cita-cita UNS sebagai *World Class University* karena pihak kampus akan memiliki fleksibilitas dalam mengatur dan membuat kebijakan, seperti diperkenankannya UNS untuk mengelola administrasi serta keuangannya secara mandiri. Dengan itu, uang yang didapatkan oleh UNS seluruhnya menjadi hak UNS dan dapat digunakan secara leluasa.

Transformasi status Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) menjadikan UNS memiliki otonomi penuh dalam mengelola keuangan. Otonomi tersebut tentunya berdampak pada berbagai bidang, salah satunya pembangunan UNS Tower yang menjadi polemik berbagai kalangan. Semenjak usulan rencana pembangunan tersebut dibahas dalam forum Majelis Wali Amanat (MWA) UNS, banyak pro dan kontra yang timbul baik dari kalangan dosen ataupun mahasiswa. Beberapa mahasiswa menilai rencana pembangunan ini belum terlalu mendesak, ada hal lain yang lebih penting untuk dibangun daripada sekadar pembangunan *tower*. Fasilitas parkiran yang rusak, AC kelas yang hanya menjadi pajangan, toilet yang tidak terawat, hingga musala yang kurang layak pakai nampaknya menjadi hal yang lebih mendesak untuk diperbaiki terlebih dahulu.

Terlepas dari adanya berbagai pro dan kontra, Muhammad Zainal Arifin yang saat itu menjadi perwakilan MWA UM (Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa) 2020/2021 telah menyampaikan pandangannya dalam Rapat Pleno MWA UNS pada Jumat, 26 Februari 2021. Terdapat tiga pandangan serta usulan yang di-

sampaikan Arifin berkaitan pembangunan UNS Tower, di antaranya adalah sumber alokasi dana yang digunakan jangan sepenuhnya dari dana SPI, dana dibagi 50 : 50 yakni 50% dari internal dan 50% dari kerja sama dengan pihak lain. Poin kedua berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) di mana pembangunan UNS Tower yang terdiri dari 11 lantai harus berorientasi pada perwujudan 8 IKU. Poin ketiga yakni pembangunan UNS Tower tidak boleh menihilkan komitmen untuk melakukan perbaikan sarpras fakultas dan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) terutama PSDKU Kebumen.

Berdasarkan penuturannya saat diwawancarai secara daring, Arifin yang saat itu menjadi perwakilan MWA UM menyatakan bahwa setelah rapat pleno pada bulan Februari sempat ada wacana yang bergulir yang menyatakan bahwa pembangunan UNS Tower akan ditunda terlebih dahulu dan dikaji lebih mendalam. "Instruksi ketua MWA UNS saat itu adalah dikaji dan diaudit secara kelayakan dengan memperhatikan dua pandangan, pandangan dari mahasiswa dan Komite Audit," tuturnya.

Walaupun Arifin sudah menyampaikan keberatannya, hingga PAW (Pergantian Antar Waktu) dengan MWA UM yang baru, sama sekali belum ada rapat kedua terkait UNS Tower dan pengesahan UNS Tower sedikit pun. Pada akhirnya di masa Zakky Musthofa Zuhad selaku MWA UM yang baru, rencana pembangunan tersebut tetap direalisasikan dan digadang-gadang akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun pembangunan. "Pada saat itu perwakilan Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa (MWA UM), Arifin sebenarnya sudah menolak tapi tetap kalah suara dalam forum tersebut. Peserta forum dari pihak MWA lain seolah mencoba membujuk bahwa pembangunan UNS Tower ini memang sangat penting demi ketercapaian 8 IKU atau Indikator Kinerja Utama yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Saat itu pun ketika awal saya menjadi MWA UM yang baru, ternyata sudah ada agenda pengesahan pembangunan UNS Tower. Saya selaku pihak MWA UM yang baru pun sudah tidak dapat menyampaikan sikap dan pandangan baru lagi karena sudah disampaikan MWA UM sebelumnya. Mau tidak mau kita harus mengamini kebijakan tersebut dengan berbagai catatan," jelas Zakky Musthofa Zuhad selaku Ketua MWA UM UNS 2021/2022.

Informasi Pembangunan UNS Tower Secara Umum

Rektor UNS, Jamal Wiwoho dalam sambutannya pada kegiatan peletakan batu pertama atau *Ground Breaking* pada Jumat (28/5/2021) menyampaikan bahwa pembangunan UNS Tower merupakan salah satu wujud optimalisasi aset. Seperti yang dilansir pada laman *uns.ac.id* pada Jumat (28/5/2021), menurut penuturan Jamal bangunan rumah dinas rektor sudah berdiri sekitar 18 tahun, tetapi selama ini tidak dipakai. Oleh karena itu, atas prinsip optimalisasi aset, dibangunlah *tower* di rumah dinas rektor UNS.

Sejalan dengan pernyataan Jamal tersebut, Muchtar selaku Direktur Keuangan dan Optimalisasi Aset juga menyatakan bahwa rumah dinas rektor kurang lebih sudah lima periode rektor tidak ditempati (18 tahun). Untuk itu di tahun 2019/2020, Direktorat Kekayaan Negara mengizinkan rumah dinas rektor untuk didemolisi. Demolisi adalah upaya menghancurkan atau perombakan dari sebuah bangunan dengan kondisi yang sudah rusak atau kondisi yang dapat membahayakan sekitar (Burra Charter, 1981).

"Setelah keluarnya keputusan demolisi pada tahun 2020, pihak kampus harus segera memikirkan bangunan tersebut akan dibuat apa. Sementara biaya *maintenance* rumah dinas rektor tiap tahun yang cukup tinggi sekitar Rp1,3 M. Oleh karena itu kampus mendesain bangunan baru yang bermanfaat untuk *civitas academica* UNS secara keseluruhan dan masyarakat. Selain itu, dalam rangka pencapaian WCU *(World Class University)* yang memerlukan standardisasi sarana prasarana yang memadai, kami merasa bangunan UNS Tower menjadi penting untuk dibangun," jelas Muchtar dalam forum Diskusi Terbuka *Ada Apa Dengan UNS Tower?* melalui Zoom Cloud Meeting pada hari Senin (9/8/2021).

UNS Tower yang dibangun di atas lahan seluas 9.975 m^2 tersebut rencananya terdiri dari sebelas lantai dengan tinggi 76 meter. Selain digunakan untuk kegiatan perkantoran, UNS Tower nantinya akan dilengkapi dengan sarana olahraga yang lengkap, kolam renang, *international conference, international office,* sentral bisnis serta terdapat ruang-ruang yang bisa disewakan untuk menunjang *revenue generation.*

Sementara itu, berdasarkan rekomendasi dinas PU provinsi Jawa Tengah, rencananya pembangunan UNS Tower membutuhkan dana

sekitar Rp148.807.323.000,00 sesuai yang tertulis dalam Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKAT) UNS 2021. Sumber pembiayaan UNS Tower tersebut direncanakan sepenuhnya berasal dari uang SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) tahun 2020 dan 2021 yang dibayarkan oleh mahasiswa baru UNS jalur Seleksi Mandiri.

Angka yang cukup fantastis, bukan? Lalu, bagaimana respons mahasiwa?

Menanggapi kritisi mahasiswa mengenai sumber biaya utama UNS Tower yang berasal dari dana SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi), Muchtar menjelaskan bahwa memang pada hakikatnya itu sudah termasuk anggaran ideal. Di mana anggaran UNS Tower berasal dari SPI tahun 2020 dan tambahan SPI tahun 2021. Menurut pemaparan beliau, komposisi dana SPI sendiri digunakan untuk beberapa hal seperti sarana prasarana fisik, kemahasiswaan serta kesejahteraan. UNS Tower ini sudah ada anggaran tersendiri yang mengambil dari alokasi untuk universitas dan tidak mengganggu alokasi SPI untuk fakultas. Secara eksplisit pun alokasi dana SPI tiap fakultas juga sudah terdistribusikan dengan baik sehingga menurutnya tidak mengganggu anggaran fakultas per tahunnya.

Muchtar juga menegaskan bahwa pembangunan UNS Tower ini orientasinya memang untuk pendidikan terutama sebagai fasilitas penunjang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Beliau juga menjamin bahwa mahasiswa bisa saja menggunakan semua fasilitas yang ada di UNS Tower sepanjang sesuai dengan urgensinya.

Respons Badan Eksekutif Mahasiswa

Menilik ke belakang mengenai urgensinya, Presiden BEM FKIP UNS 2021, Alqis Bahnan mengkritisi pembangunan UNS Tower dari segi urgensi pembangunannya di masa pandemi. Aktivitas perkuliahan mahasiswa saja masih diminimalisasi, kampus justru melaksanakan pembangunan secara besar-besaran. Ia berpendapat jika tujuan pembangunan UNS Tower hanya untuk memenuhi standarisasi kampus PTN-BH, mengapa tidak melakukan renovasi gedung/bangunan yang sudah ada menjadi standar internasional. "Karena asumsinya jika kita membangun gedung baru, secara tidak langsung akan menambah beban. Terlebih ini di masa pandemi, *toh* kalau UNS Tower hendak dijadikan ladang bisnis kemungkinan kecil dalam waktu dekat belum bisa menguntungkan UNS. Justru malah membebani UNS sendiri dari segi pemakaian, pengelolaan bangunan maupun uang operasional listrik dan sebagainya," terangnya.

Alqis juga mengkritisi pergerakan BEM yang cukup pasif dalam mengawal kebijakan pembangunan UNS Tower di awal-awal munculnya kebijakan tersebut. Ia merasa seolah semua BEM sudah pasrah dengan keputusan kampus. Namun, sebenarnya ada hal lain yang justru lebih membuatnya jengkel yakni mengenai transparansi progres proyek yang tidak terbuka untuk publik serta terbatasnya akses data yang bisa dikulik untuk dijadikan bahan eskalasi pergerakan. Sejauh ini pergerakan yang bisa ia lakukan bersama teman-teman BEM ialah dengan terus melaksanakan propaganda serta melakukan diskusi internal yang difasilitasi oleh Kementerian Kajian Kebijakan Kampus BEM FKIP UNS.

Bulan Juli lalu, BEM FKIP UNS melalui Instagram resminya *@bemfkipuns* sempat memberikan persembahan lagu UNS Tower kepada pihak kampus. Sontak mahakarya kritis mahasiswa yang dituangkan dalam lirik lagu penuh satire tersebut mendadak viral dan mendapatkan komentar dari berbagai mahasiswa yang justru mengadu nasib kemalangannya sebagai mahasiswa UNS yang belum merasakan fasilitas perkuliahan secara layak. Mulai dari komentar satire, "Ayo sini kuliah UNS biar uangnya bisa dipakai bangun *tower*", hingga rintihan mahasiswa kampus 4 atau kampus Kebumen yang curhat mengenai jalanan parkir yang seperti ampyang bergeronjal, GOR, aula serasa tempat syuting dunia lain, dan sebagainya.

Akhir-akhir ini pihak BEM Fakultas lain pun turut menyuarakan keresahannya melalui akun resmi Instagram mereka. Salah satunya adalah pihak BEM Fakultas Pertanian (FP) yang membuat kompilasi video mengenai respons mahasiswa FP terkait pembangunan UNS Tower serta cuplikan kajian apakah pembangunan super megah UNS Tower merupakan suatu keputusan yang tepat. Hal serupa juga dilakukan oleh pihak BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang membuat unggahan di Instagram mengenai kontroversi pembangunan UNS Tower di masa pandemi serta potret pembangunan yang kurang memprioritaskan pemerataan fasilitas di kampus wilayah.

Menimbang esensi dan urgensi pembangunan UNS Tower di masa pandemi yang belum terlalu urgen, Zakky Zuhad menegaskan

ada tiga hal yang harus dikawal bersama dalam pembangunan *tower*. "Pertama, jangan sampai uang SPI semuanya dianggarkan untuk UNS Tower. Kampus sebagai pelayan kepuasan mahasiswa seharusnya bisa lebih memperhatikan kesetaraan pembangunan dan keadilan fasilitas sarana prasarana Program Studi di Luar Kampus Utama. Kedua, manajemen UNS Tower harus berpihak kepada mahasiswa. Sebagai contoh lantai dua akan dibangun fasilitas kolam renang, *gym*, dan sebagainya. Harapannya akses tersebut terbuka dan berpihak kepada mahasiswa. Misalkan tarif untuk umum seharga Rp100.000,00 maka untuk mahasiswa UNS mungkin bisa diberikan tarif Rp5.000,00 bahkan hingga gratis. Ketiga, mari tuntut pembangunan kampus wilayah agar dilaksanakan di tahun ini. Jangan pernah menihilkan pembangunan di kampus wilayah," tandasnya.

Langkah Strategis Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa (MWA UM) UNS

Berangkat dari keputusan pembangunan UNS Tower yang pada akhirnya diamini dan disahkan di bulan Maret 2021. Menurut Zakky Zuhad, pihak MWA UM dan mahasiswa kini memiliki PR yang cukup besar, yakni bagaimana terus mengawal implementasi pembangunan dan penggunaannya. Apakah akan tetap berpihak pada mahasiswa atau justru sebaliknya. "Kami sudah mencoba berkomunikasi dengan Prof. Jamal selaku Rektor UNS berkaitan dengan apa saja yang menjadi aspirasi dan keresahan mahasiswa yang kurang sepakat dengan pembangunan UNS Tower yang dilakukan di kala pandemi ini. Kami sudah mengadakan pertemuan dua kali untuk membahas UNS Tower, pertemuan pertama intinya kami menuntut adanya pembangunan yang masif di kampus wilayah khususnya dengan menghadirkan keadilan sarana prasarana seperti di kampus pusat Kentingan," tutur Zakky.

Pihak MWA UM terus mengupayakan komunikasi dengan *stakeholder* agar kampus nantinya memiliki manajerial UNS Tower yang berpihak pada mahasiswa baik dari segi administrasi maupun finansial. Misalnya jika pembangunan UNS Tower sudah selesai, pihak kampus harus bisa memberikan jaminan kemudahan penggunaan fasilitas tersebut untuk mahasiswa. Pada pertemuan pertama tersebut pihak rektorat pun mengamini tuntutan yang diajukan mahasiswa dan menyatakan bahwa sudah ada *masterplan* terkait pembangunan kampus wilayah. Namun nyatanya di pertemuan kedua, Jamal mengatakan bahwa pihak kampus akan mengutamakan UNS Tower terlebih dahulu, setelah selesai barulah melaksanakan pembangunan kampus wilayah. Hal inilah yang akhirnya menyulut semangat dan menjadi bensin mahasiswa untuk terus mengawal kebijakan yang diambil oleh kampus dikarenakan pernyataan pihak kampus yang kurang konsisten.

"Jangan sampai pembangunan menihilkan kampus wilayah," ujar Zakky Zuhad.

Hal tersebut juga diperkuat oleh Raditia Yoke selaku Kepala Bidang Kajian Strategis MWA UM UNS. Ia menegaskan bahwa UNS memang sudah menargetkan pembangunan *tower* akan selesai di akhir tahun 2021. Kemudian pembangunan kampus wilayah khususnya Mesen baru akan dimulai di tahun 2022. "Proses pembangunan pun sudah berjalan, untuk itu pihak MWA UM juga tak dapat menolak lagi," tuturnya.

Berkaitan dengan langkah yang dilakukan oleh Bidang Kastrat BK MWA UM dalam mengawal kebijakan pembangunan UNS Tower, saat ini pihaknya bersama Kementerian Analisis Kebijakan Perguruan Tinggi (AKPT) BEM UNS sedang membentuk tim untuk menghasilkan *policy brief* terkait pembangunan UNS Tower tersebut. "Saat ini memang belum ada naskah akademik yang keluar, aktivitas kami di Kastrat BK MWA UM baru di tahap *brainstorming*, mempelajari isu, mengadakan diskusi terbuka, memberi catatan di tiap draf yang akan dibahas di rapat komisi MWA, dan riset ke mahasiswa. Agenda pembuatan *policy brief* tersebut akan kita eksekusi bulan September atau Oktober tahun ini," tutur Raditia Yoke saat diwawancarai via WhatsApp.

Langkah kedepannya, pihak BK MWA UM akan terus berusaha menjadi pipa penghubung secara vertikal dari mahasiswa kepada pihak *stakeholder* UNS Tower. Di antaranya dengan mencarikan akses data dan melakukan diskusi langsung kepada pihak pimpinan. Yoke selaku Kepala Bidang Kastrat MWA UM juga berharap mahasiswa UNS selalu memberikan dukungan, masukan, serta kritikan kepada pihak MWA UM agar kebijakan-kebijakan yang muncul dari *stakeholder* senantiasa bisa berpihak kepada mahasiswa.

Pandangan Mahasiswa Terkait Pembangunan UNS Tower di Masa Pandemi

Salah seorang mahasiswa FEB yang tidak ingin disebutkan identitasnya menyatakan bahwa pendirian UNS Tower sendiri memang menjadi salah satu cara UNS untuk dapat mencapai 8 IKU PTN dari Kemendikbudristek. "Mungkin yang menjadi masalah di sini adalah karena dari pihak universitas sebelumnya tidak menyampaikan informasi terkait pembangunan UNS Tower tersebut ke mahasiswa," terangnya.

"Saya pribadi merasa bahwa pemanfaatan SPI untuk membangun fasilitas universitas masih dapat diterima, tapi SPI seharusnya bisa dijadikan subsidi silang untuk teman-teman yang membutuhkan," ujar mahasiswa FEB.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Chusnul, mahasiswa FKIP, juga menilai pembangunan UNS Tower tersebut kurang bijak dan terkesan memaksakan kehendak di masa pandemi. Namun karena pembangunan sudah berjalan dan terus dikebut hingga akhir tahun, ia hanya bisa berharap jika gedung tersebut sudah jadi semoga bisa dirawat dengan baik dan bisa menjadi pelengkap fasilitas serta penunjang perkuliahan mahasiswa dan dosen. Tak ketinggalan ia juga mengkritisi mengenai sistem *website* UNS seperti Spada, OCW, dan Siakad yang masih sering *down* serta tampilan *interface* yang terlalu kuno. Chusnul memberikan pesan kepada pihak kampus untuk melakukan perbaikan sistem pengelolaan situs terlebih dahulu dibandingkan membangun UNS Tower. Ia merasa perbaikan situs yang sering *down* lebih penting untuk direalisasikan di masa perkuliahan daring seperti ini.

Lain halnya dengan Chusnul, Arini Nurfadillah, mahasiswa Pendidikan Matematika, justru menyambut antusias pembangunan UNS Tower tersebut karena ia merasa pembangunan tersebut akan memberikan manfaat yang luar biasa serta memiliki prospek sebagai pusat kegiatan UNS dalam pengembangan berbagai hal yang berkaitan dengan perwujudan 8 IKU universitas. Hal serupa juga disampaikan oleh Chalimatus, mahasiswa Farmasi, yang setuju dengan pembangunan UNS Tower karena bisa menjadi ikon atau *branding* kampus UNS kepada pihak luar.

Apakah Pembangunan Super Megah UNS Tower Merupakan Keputusan Yang Tepat?

Menurut Muchtar selaku Direktur Keuangan dan Optimalisasi Aset, sebagai sebuah PTN-BH, optimalisasi aset tetap harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan. "Perlu disadari bahwa sejak tahun 2014 Pemerintah Pusat tidak lagi memberikan alokasi pembangunan sarana-prasarana fisik ke UNS, sehingga yang dioptimalkan sekarang sesuai dengan kemampuan keuangan universitas. Tentu universitas sebesar UNS tidak bisa secara simultan dalam satu atau dua tahun anggaran semuanya dapat teratasi, harus bertahap," terangnya saat diwawancarai secara daring.

Sejalan dengan pernyatan tersebut, pada hakikatnya jika ditinjau dari segi lingkungan, sebenarnya pembangunan UNS Tower sudah penuh pertimbangan. Seperti yang dituturkan oleh Kepala Program Studi Ilmu Lingkungan, Prabang Setyono, "Pembangunan UNS Tower sendiri sudah mempunyai dokumen AMDAL yang mana salah satunya sudah memperhitungkan aspek dampaknya untuk lingkungan sekitar. Jadi saya rasa aman-aman saja. Tinggal bagaimana melaksanakan kaidah dokumen AMDAL itu sendiri dalam proses konstruksi serta operasionalnya. Jika tidak sesuai kaidah dokumen AMDAL yang berupa RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) maka bisa dilakukan tindak lanjut sesuai kadar pelanggarannya untuk diklarifikasi antara pihak pemrakarsa yaitu UNS dengan pengawas dari pemerintah yaitu DLH (Dinas Lingkungan Hidup)," tuturnya.

Terlepas dari adanya berbagai faktor yang melatarbelakangi pembangunan UNS Tower, kita lihat saja bagaimana kebijakan lanjutan manajerial pembangunan UNS Tower tersebut, semoga saja tetap berpihak kepada mahasiswa dan bukan hanya janji manis belaka.

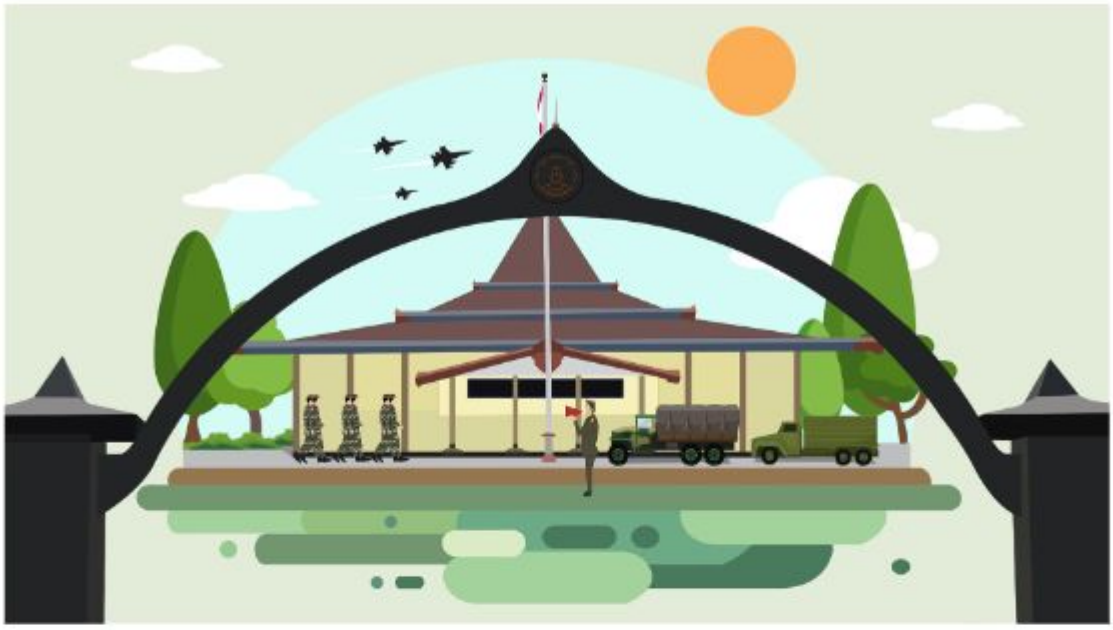

Illustrasi: Raulliano Bagus Aguiera

MILITER MASUK KAMPUS, SOPANKAH BEGITU?

Oleh: Muchammad Achmad Afifuddin dan Sabila Soraya Dewi

Mari menengok ke belakang, yaitu hal yang paling fundamental di dalam lingkungan pendidikan. Semudah melontarkan pertanyaan: Apakah militer atau aparat boleh memasuki lingkup pendidikan termasuk kampus? Pertanyaan seperti ini memang jarang dianggap atau bahkan terkadang dilihat sebagai hal yang normal. Seperti yang kita ketahui, di lingkup kampus UNS sudah melibatkan para aparat dalam hal apa pun. Pelibatan tersebut dapat dilihat dari hal yang paling sederhana, *yap* ornamen di danau UNS. Di danau UNS terdapat pesawat terbang milik TNI AU sebagai penghias, yang kalau dipikir-pikir, pesawat tersebut tidak ada unsur estetikanya sama sekali alias *ndak masuk blas!*

Tentu, masih banyak lagi contoh keterlibatan unsur militer dalam kampus. Contoh tersebut seperti Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) yang diemban oleh Jenderal Tentara Negara Republik Indonesia yang masih aktif menjabat, beberapa kunjungan dari polisi ataupun TNI ke dalam Gedung Rektorat beberapa bulan yang lalu, serta penandatanganan kerja sama dengan sebuah klub bola milik POLRI. Hal ini pun bisa dilihat dalam postingan akun Instagram *@11maret-mendem*. Mungkin, bagi kebanyakan orang, militer masuk kampus ataupun lingkungan pendidikan merupakan hal yang "normal". Namun, sebenarnya tidaklah demikian.

Jauh sebelum memasuki bangku perkuliahan, mungkin masih begitu segar ingatan kita ketika mengenyam bangku SMA, sering kali kita jumpai anggota kepolisian saat Ospek atau MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah). Para aparatur berseragam yang "sok" gagah ini keluar masuk sekolah, entah itu dengan alasan pemberian materi Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) maupun sosialisasi tentang bahaya narkoba yang masih bisa diperdebatkan kebenarannya hingga sekarang. Lalu, yang dipermasalahkan dalam tu-

lisan panjang lebar ini adalah: Apakah unsur militer boleh masuk ke lingkungan pendidikan? *Kok* dirasa kebanyakan orang tidak ada masalah dan cenderung menormalisasi hal semacam ini?

Militer Keluar Masuk Lingkungan Pendidikan, Bolehkah?

Masih ingat dengan rencana pengadaan Pendidikan Bela Negara yang akan dilakukan setiap kampus? Program yang direncanakan oleh Menteri Pertahanan tahun lalu tersebut berdalih bahwa diadakannya Pendidikan Militer melalui Program Bela Negara disebut sebagai upaya pemerintah agar generasi milenial tak hanya kreatif dan inovatif, tetapi juga cinta dengan bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah alasan klasik, bukan? Seperti dilansir dari *hukumonline.com* (19/8), Wakil Menteri Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa kecintaan generasi milenial terhadap negara juga bisa ditunjukkan dengan bergabung dalam Komponen Cadangan (Komcad), seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN).

Mungkin, kita semua bisa sedikit bernapas lega karena tiada perkembangan lebih lanjut mengenai pengadaan Pendidikan Militer di setiap kampus, terutama pelaksanaannya dalam kampus UNS. Hal ini dapat dilihat dari modul atau buku *Panduan Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka* yang diterbitkan oleh UNS Press tahun 2020. Di dalam pembahasannya, yang terletak pada Bab 10 berjudul "Pelatihan Bela Negara", sama sekali tidak ada kata yang mewajibkan seluruh mahasiswa untuk mengikuti Program Bela Negara. Memang, di atas kertas kita bisa sedikit tenang. Akan tetapi, dalam praktiknya kampus UNS sudah terlalu sering menerima kunjungan atau bahkan menandatangani kontrak kerja sama dengan unsur militer. Lalu, kembali ke permasalahan paling dasar. Apakah unsur militer boleh masuk lingkungan pendidikan atau kampus?

Dilansir dari *hukumonline.com*, Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosari menyebutkan, upaya-upaya untuk melibatkan TNI dalam tugas-tugas di luar tupoksi utamanya, tentu memiliki aturan main yang harus ditaati. Menurut Ikhsan, jika menilik ketentuan pasal 7 ayat (2) UU TNI, dari 14 item yang termasuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), tidak ada satu pun poin yang menyebut sektor pendidikan menjadi bagian dari OMSP. Ia menambahkan, Kemendikbud seharusnya lebih menjamin kebebasan mimbar akademik kampus yang terganggu beberapa waktu belakangan ketimbang mengaminkan militerisasi sektor pendidikan.

Kritik ini ditulis bukanlah tanpa dasar, terdapat indikasi yang lebih menakutkan, yaitu diberangusnya ruang kebebasan di dalam kampus dan kebebasan mimbar akademik. Bahkan, jauh sebelum unsur militer masuk kampus, pemberangusan ruang itu sudah diinisiasi oleh beberapa pihak kampus sendiri. Seperti yang dituliskan pada riset Lokataru Foundation berjudul "Diberangus di Kampus" yang terbit tahun 2019, terdapat banyak sekali kasus pemberangusan ruang demokrasi di kampus. Pemberangusan tersebut dimulai dari pelarangan pemutaran film hingga diskusi dengan topik-topik kontroversial.

Salah satu contoh kasusnya adalah pembubaran pemutaran film "Samin vs Semen" tahun 2015 di Universitas Brawijaya hingga mahasiswa yang melawan pembubaran ini diancam *drop-out* oleh pihak kampus. Pada tahun yang sama, mahasiswa Universitas Negeri Semarang acap kali menerima intimidasi karena mengadakan berbagai diskusi, antara lain diskusi tentang Hari Kesaktian Pancasila yang didatangi oleh pihak aparat. Kemudian, peristiwa lain terjadi pada tahun 2016 yaitu mahasiswa yang mengikuti aksi dan membuat tulisan "Jangan Perpanjang Barisan Perbudakan" dipanggil Wakil Dekan 3 dan dipotong uang beasiswanya.

Selain itu, pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 Universitas Muhammadiyah Semarang mengalami berbagai intimidasi karena mengadakan diskusi terkait isu-isu gender dan feminisme. Intimidasi dilakukan oleh pihak kampus, ormas, polisi, militer, ataupun sesama masyarakat. Bentuk intimdasinya antara lain: ancaman pembubaran paksa, pengambilan video, hingga pencabutan beasiswa terhadap mahasiswa yang melawan. Di Bandung, pemutaran film pengkhianatan G30S/PKI di Universitas Padjajaran dihentikan oleh Koramil atas suruhan dari Rektorat.

Sudut Pandang Berbeda

Hal lain dikatakan oleh salah satu dosen dari Fakultas Hukum. Ketika beliau diwawancarai (7/7) melalui WhatsApp, beliau mengemukakan bahwa:

> *"Kedatangan ataupun penandatanganan kerja sama dengan instansi militer tidak akan mengganggu iklim demokrasi mahasiswa."*

Kerja sama dengan berbagai pihak itu merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan bernegara yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, kekhawatiran mahasiswa terhadap pembubaran aksi atau bentuk pembungkaman lainnya tidak akan terjadi. Masing-masing akan berperan sesuai tugas fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketika ditanya bagaimana efek ketika unsur militerisme masuk terlalu dalam ke lingkungan kampus, beliau menjelaskan bahwa akan terjadi komunikasi dua arah yang seimbang antara dunia akademik dan praktik di lapangan. Diharapkan dengan komunikasi yang seimbang akan mempermudah proses pembelajaran dan dapat memperkuat posisi mahasiswa sebagai *Agent of Change* karena semua persoalan akan dilihat dari berbagai perspektif. Selain itu, beliau juga menjelaskan tidak perlu ada peraturan baru terkait unsur militer masuk kampus. Hal ini karena dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas apa yang menjadi tugas perguruan tinggi dan apa yang menjadi tugas militer sehingga tidak perlu saling mengintervensi.

Usaha Menolak Militerisasi Kampus

Dalam usaha menolak unsur militer masuk ke dalam lingkup kampus, dibentuklah piagam integritas antara pihak kampus dan militer. Berdasarkan keterangan dari Zakky Musthofa, Presiden BEM UNS 2021, piagam tersebut telah dibentuk pada kepengurusan BEM sebelumnya yaitu era Zainal Arifin. Terdapat lima poin yang diusulkan dalam Piagam MWA UNS Usulan Mahasiswa atau Piagam Integritas. Poin-poin tersebut masih bisa dilihat dalam unggahan akun Instagram *@bkmwauns.um* pada tanggal 26 Januari 2021. Ada dua poin penting yang dapat disoroti terkait adanya unsur militer yang masuk dalam jajaran birokrasi kampus, yaitu poin keempat dan poin kelima yang berbunyi: "Berkomitmen tinggi dan menjamin kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di lingkungan kampus," serta "Mewujudkan iklim pendidikan di lingkungan kampus yang bebas dari intervensi kebijakan militerisme."

Saat diwawancara melalui Google Meet (7/8), Zakky mengatakan bahwa dari BEM sendiri sudah berusaha mencegah masuknya unsur militer ke dalam jajaran birokrasi kampus. BEM telah mengajukan narasi untuk menolak penetapan Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Ketua MWA UNS atau sosok yang paling kuat. Akan tetapi, saat pemilihan ketua MWA beliaulah yang terpilih. Sementara organ yang tertinggi pasca UNS ditetapkan sebagai PTN-BH bukanlah rektor, melainkan MWA. Oleh karena itu, sangat disayangkan MWA UNS diketuai oleh seorang TNI yang dikatakan sebagai representasi unsur masyarakat.

"Ketika kita kulik kembali, siapa *sih* sebenarnya representasi dari unsur masyarakat? Apakah benar seorang TNI? Sedangkan secara persentase profesi yang ada di masyarakat ini mayoritas adalah petani dan buruh. *Lah*, kenapa enggak berpikir memilih representasi dari petani atau buruh, di mana mereka lebih realistis menggambarkan keadaan masyarakat? Sehingga ketika ada kebijakan ataupun sesuatu yang harus diputuskan akan didasarkan pada pandangan masyarakat menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Ya, kemungkinan cara berpikir panglima menurutku tidak merepresentasikan keadaan apa yang dirasakan masyarakat. Aku juga enggak tahu beliau mungkin pernah miskin atau *gimana* atau malah mungkin dari lahir sudah sultan. Kan kita enggak tahu secara *track record*. Kemungkinan cara berpikirnya ya militer," jelasnya.

Zakky berpendapat bahwa memasukkan Marsekal Hadi Tjahjanto ke MWA sudahlah salah, apalagi menetapkan beliau sebagai ketua. "Sejauh ini beliau pun jarang mengikuti rapat dan selalu menitipkan kepada wakilnya. Jadi menurutku, kita harus tetap kawal bagaimana lang-

kah-langkah beliau selaku Ketua MWA UNS, karena menurutku juga ketika beliau dimasukkan ke MWA itu sudah salah apalagi ini malah ditetapkan sebagai ketua, ya makin kacau," ungkapnya.

Memang, pada akhirnya kita bisa sedikit lega ketika mengetahui bahwa Program Bela Negara atau pendidikan militer yang diadakan di kampus UNS memiliki kualifikasinya tersendiri. Akan tetapi, yang perlu dilakukan sekarang adalah mengawal bagaimana langkah-langkah selanjutnya Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Ketua MWA UNS.

Walaupun memang sebenarnya secara undang-undang unsur militerisme dan pendidikan tidak cocok untuk saling berintegrasi karena orientasi lembaga yang sudah berbeda pula. Terlebih lagi jika kita berbicara tentang pola pikir. Pola pikir militer dengan para mahasiswa tentu sudah sangat jauh berbeda. Di akhir kata, semoga saja dengan beliau menjabat sebagai Ketua MWA UNS tidak memperparah pemberangusan ruang kebebasan akademik yang sebelumnya sudah mulai diintervensi oleh kampus sendiri dengan pemanggilan beberapa mahasiswa oleh beberapa pihak Fakultas di UNS.

"Jangan sampai jabatan yang lebih tinggi ini disalahgunakan untuk memasukkan kepentingan militeristik yang bisa menghapus mimbar kebebasan akademik."

ADA ISU APA HARI INI?

Teruntuk kalian, para mahasiswa yang memendam keresahan seputar kampus, tetapi bingung hendak menyampaikan ke mana?

Kalian bisa sampaikan melalui bank isu **LPM Kentingan** dengan mengakses pranala berikut:

http://bit.ly/bankisulpmkentingan

saluransebelas.com kentinganpers KentinganPers

SPI UNS SEMAKIN TINGGI, SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN BELUM TERPENUHI

Oleh: Tim Riset LPM Kentingan UNS

Ilustrasi: Sheilla Fitri Honey W

SPI adalah singkatan dari Sumbangan Pengembangan Institusi. SPI sendiri mulai diberlakukan pada tahun 2019 silam, khususnya bagi mahasiswa baru yang masuk melalui jalur SM (Seleksi Mandiri) UNS. Dasar hukumnya adalah Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017 tentang BKT dan UKT serta Peraturan Rektor UNS Nomor 14 Tahun 2019 tentang Persyaratan, Tata Cara, dan Biaya Pendidikan alam Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma Jalur Seleksi Mandiri Universitas Sebelas Maret Tahun 2019. Kebijakan mengenai SPI di jalur SM UNS terus berlanjut hingga tahun ini. Bahkan setelah UNS ditetapkan menjadi PTN-BH, kuota mahasiswa baru dari jalur seleksi mandiri naik menjadi 45% sehingga otomatis penyumbang SPI pun akan semakin banyak.

Dikutip dari *bemuns.com*, berdasarkan hasil notula audiensi BEM UNS dengan jajaran Rektorat UNS bahwa dasar pemikiran menerima mahasiswa dari jalur Mandiri adalah mahasiswa membayar SPI berarti membawa fasilitas sendiri. SPI ini akan dipakai untuk menunjang sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana perkuliahan, mendukung standar kegiatan internasional, dan kegiatan kemahasiswaan baik nasional maupun internasional. Namun, sayangnya manfaat dari SPI sendiri belum dirasakan seluruh mahasiswa UNS. Padahal biaya SPI semakin tinggi, tetapi sarana dan prasarana pendidikan belum semua terpenuhi.

Maka dari itu, Tim Riset LPM Kentingan UNS melakukan survei pada 26 Juli-6 Agustus 2021 untuk mengetahui tanggapan mahasiswa aktif Universitas Sebelas Maret Surakarta terhadap kebijakan SPI UNS. Pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif dengan metode jejak pendapat melalui penyebaran kuesioner *online* dengan pertanyaan tertutup kepada mahasiswa aktif UNS dari 11 fakultas (FK, FMIPA, FP, FT, FSRD, FIB, FEB, FISIP, FH, FKIP, dan FKOR) dan Sekolah Vokasi. Jumlah responden pada riset kali ini sebanyak 200 responden. Kami menentukan responden melalui *simple random sampling*.

1. Apakah Anda setuju dengan diberlakukannya SPI di jalur Seleksi Mandiri UNS?

2. Apakah menurut Anda kebijakan SPI adalah sebuah bentuk komersialisasi dalam bidang pendidikan?

Berdasarkan data riset dari 200 responden yang sudah diolah, memperoleh hasil bahwa 32,5% (65 responden) setuju dengan adanya Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang diberlakukan pada jalur seleksi mandiri Universitas Sebelas Maret. Sisanya sebanyak 67,5% (135 responden) tidak setuju dengan adanya Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang diberlakukan pada jalur Seleksi Mandiri Universitas Sebelas Maret. Selanjutnya, terdapat 72,5% (145 responden) setuju dengan pernyataan bahwa SPI merupakan sebuah bentuk komersialisasi dalam bidang pendidikan, sementara responden yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut terdapat 27,5% (55 responden).

3. Apakah Anda termasuk penyumbang SPI UNS?

4. Dana SPI sendiri salah satunya dialokasikan untuk menunjang sarana prasarana pendidikan. Apakah menurut Anda sarana prasarana pendidikan di UNS sudah baik, lengkap, dan memadai?

Dari 200 responden diketahui bahwa 38% (76 responden) merupakan penyumbang SPI UNS dan sisanya sebanyak 62% (124 responden) bukan termasuk penyumbang SPI UNS. Hal tersebut artinya sebanyak 76 responden mengikuti jalur seleksi mandiri UNS. Dapat kita ketahui bahwa SPI dipakai untuk menunjang sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana perkuliahan, mendukung standar kegiatan internasional, dan kegiatan kemahasiswaan baik nasional maupun internasional, tetapi sesuai dengan data hasil riset diketahui bahwa hanya 19% (38 responden) yang mengaku bahwa sarana prasarana pendidikan di UNS sudah baik, lengkap, dan memadai. Sisanya sebesar 81% (162 responden) mengaku bahwa sarana prasarana pendidikan di UNS masih belum baik, lengkap, dan memadai.

5. Apakah menurut Anda sarana dan prasarana pendidikan UNS sudah sesuai dengan standar perguruan tinggi bertaraf internasional?

Selanjutnya, sesuai dengan hasil riset diketahui sebanyak 10% (20 responden) setuju bahwa sarana dan prasarana pendidikan UNS sudah sesuai dengan standar perguruan tinggi bertaraf internasional. Sisanya, sebanyak 90% (180 responden) tidak setuju dengan pernyataan sarana dan prasarana pendidikan UNS sudah sesuai dengan standar perguruan tinggi bertaraf internasional.

6. Menurut Anda masih ada kesenjangan sarana prasarana pendidikan di kampus pusat dan kampus wilayah?

UNS memiliki kampus pusat dan kampus wilayah yang tentunya menyediakan sarana prasarana pendidikan. Terdapat 94% (188 responden) menyatakan terdapat kesenjangan sarana prasarana pendidikan di kedua lokasi tersebut dan sisanya 6% (12 responden) menyatakan tidak ada kesenjangan sarana prasarana pendidikan di kampus pusat dan kampus wilayah.

7. Menurut Anda sarana dan prasarana pendidikan apa yang masih kurang memadai dan perlu diperbaiki di kampus UNS pusat maupun wilayah?

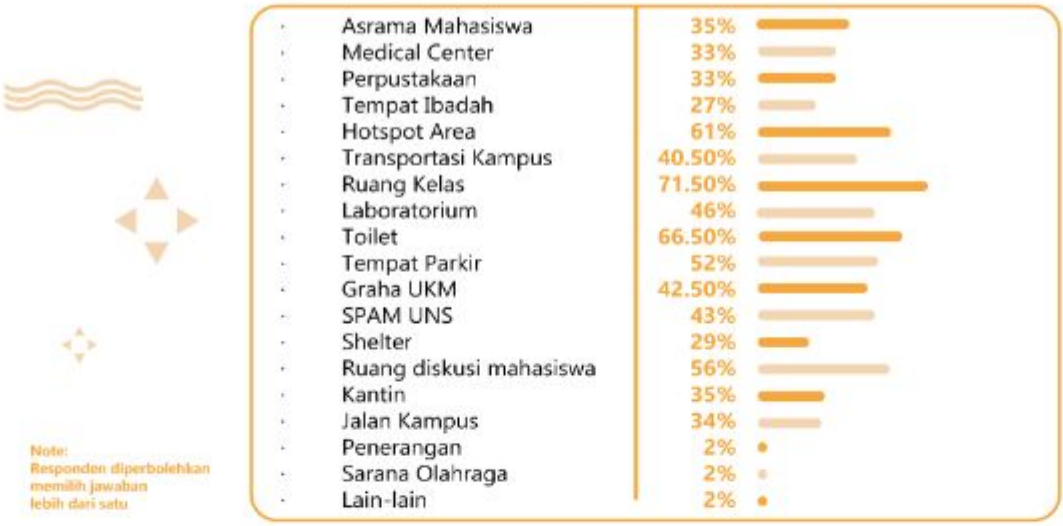

Berdasarkan data yang sudah kami peroleh sebelumnya diketahui bahwa banyak mahasiswa UNS yang berpendapat bahwa sarana dan prasarana perguruan tinggi ini belum baik atau kurang memadai. Adanya hal tersebut maka diperlukan perbaikan dari sarana dan prasarana yang sudah disediakan. Lantas, apa saja sarana dan prasarana yang kurang memadai dan perlu perbaikan? Sarana prasarana tersebut antara lain asrama mahasiswa, *medical center,* perpustakaan, tempat ibadah, *hotspot area*, transportasi kampus, ruang kelas, laboratorium, toilet, tempat parkir, graha UKM, SPAM UNS, *shelter,* ruang diskusi mahasiswa, kantin, jalan kampus, penerangan, sarana olahraga dan lain-lain. Dapat diketahui pada data yang kami peroleh bahwa yang berpendapat asrama mahasiswa kurang memadai dan perlu perbaikan yaitu sebanyak 35%, *medical center* 33 %, perpustakaan 33%, tempat ibadah 27%, *hotspot area* 61%, transportasi kampus 40,5% ruang kelas 71,5%, laboratorium 46%, toilet 66,5 %, tempat parkir 52%, graha UKM 42,5 %, SPAM UNS 43%, *shelter* 29%, ruang diskusi mahasiswa 56%, kantin 35%, jalan kampus 34%, penerangan 2%, sarana olahraga 2%, dan lain-lain sebanyak 2%.

Berdasarkan data yang kami peroleh tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) pada jalur Seleksi Mandiri UNS belum menunjang sarana dan prasarana pendidikan di kampus pusat maupun kampus wilayah. Kita ketahui bersama bahwa biaya SPI semakin tinggi. Banyak mahasiswa yang tidak setuju dengan diberlakukannya SPI pada jalur seleksi mandiri UNS. Data responden yang kami peroleh sebagian besar merupakan penyumbang dana SPI. Selanjutnya, banyak mahasiswa yang berpendapat jika SPI merupakan sebuah bentuk komersialisasi dalam bidang pendidikan sehingga dana SPI seharusnya cukup untuk menunjang sarana prasarana pendidikan. Terkait dengan standar sarana prasarana, UNS belum termasuk dalam standar internasional. Selain itu, terdapat kesenjangan sarana prasarana di kampus pusat maupun kampus wilayah. Sesuai dengan data dapat kita ketahui kebanyakan responden mengatakan bahwa sarana prasarana yang kurang memadai adalah ruang kelas. Berangkat dari hal tersebut, diharapkan adanya SPI dapat meningkatkan sarana prasarana perguruan tinggi yaitu dengan melakukan perbaikan pada sarana prasarana yang kurang memadai. Semoga adanya pendapat mahasiswa UNS mengenai dana SPI dan sarana prasarana perguruan tinggi dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pihak kampus untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan di UNS.

Kompas Pendidikan Tinggi Kita Rusak

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali meluncurkan kebijakan baru untuk pendidikan tinggi yang bertajuk "Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)". Kebijakan tersebut memberikan hak pada mahasiswa untuk dapat mengambil mata kuliah di luar program studinya selama tiga semester dan di luar kampus selama dua semester. Selain itu, terdapat kegiatan lain seperti pertukaran pelajar, magang, riset, dan proyek kemanusiaan. Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut permasalahan pendidikan tinggi dapat teratasi. Salah satunya adalah tentang penyerapan tenaga kerja dan relevansi lulusan dengan dunia industri (dalam gelaran MWA UI, Rabu (2/6)). Akan tetapi, dari kebijakan tersebut muncul beberapa pertanyaan seperti: Sudahkah mahasiswa merdeka atau hanya dijadikan korban dari persiapan produk industri saja?

Ternyata jauh sebelum ini, Majalah Kentingan edisi 2 tahun 1992 juga sempat mengulas masalah serupa dengan judul Potret Pendidikan Tinggi Kita. Dengan empat fokus utama, majalah ini mengangkat mengenai permasalahan dunia pendidikan dan industrialisasi.

Tak menutup mata bahwa degradasi nilai moral dan merebaknya kecurangan merupakan beberapa polemik konkret di kalangan mahasiswa hanya demi deret angka di lembar KHS. Padahal, perguruan tinggi berdiri guna mencetak manusia-manusia intelek dan manusiawi, sanggup berpikir dan bekerja untuk masyarakat dan negara, bukan semata-mata hanya sebuah jembatan menuju lapangan pekerjaan (dikutip dari halaman 10).

Sah-sah saja jika kurikulum mengarahkan mahasiswa untuk lebih memiliki kemampuan praktis. Akan tetapi, jangan sampai mengesampingkan kesiapan mental dan tujuan utama pendidikan sebagai pencetak manusia yang seutuhnya (dikutip dari halaman 15). Tujuan utama pendidikan itu sendiri adalah menjadikan peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab seperti isi dari Pasal 3, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

"Pokoknya, bagaimanapun caranya akan aku lakukan agar IPK-ku bagus, lulus dan dapat kerja enak, terus gaji layak!"

Merindukan Kelas

Aku bersama teman-teman pernah bosan di kelas (tidak ada yang seru). Kemudian, kami memikirkan permainan yang seru dan menarik. Setelah itu, kami mengambil bola untuk bermain sepak bola di halaman. Aku menjadi kiper sepak bola. Kami bermain sangat gembira. Tak disangka, seorang teman menendang bola ke arah-ku. Aku pun kesakitan karena bola mengenai sesuatuku. Aku menelepon ibuku dan dibawa ke Randu (Cepogo). Ternyata aku disunat. Aku pun merasa lega dan tidak masuk sekolah selama 3 hari.

Kini, aku sudah kelas 5. Kami bosan di kelas karena bola disita, kelereng diambil, dan stik dibuang. Kami memikirkan permainan tanpa mainan. Kami akhirnya menemukan permainan lain, yaitu petak umpet. Kami akhirnya bermain dengan bahagia. (Muhammad Rafiq Nur Ikhsan dalam buku "Piknik ke Sekolah-Memoar Bersekolah Murid-Murid SD Muhammadiyah Program Khusus Boyolali", 2017).

Barusan adalah secuplik tulisan Rafiq, bocah laki-laki asal SD Muhammadiyah Boyolali. Saat menulisnya, Rafiq masih duduk di kelas lima SD. Jadi, kira-kira saat ini sudah enam tahun dia menjalani tiap paginya di ruang kelas. Seandainya seorang mahasiswa masih harus berangkat ke kelas di tahun keenam kuliahnya, sudah pasti dia bakal stres berat dan sudah sibuk mencari joki skripsi terpercaya. Namun, enam tahun itu belum juga setengah dari masa pendidikan yang harus ditempuh Rafiq. Pertempuran masih panjang. Rafiq harus menjalani kehidupan di kelas bertahun-tahun lagi sampai dia menuntaskan "sekolahnya" dan dianggap matang oleh kehidupan sosialnya.

Vera Safitri
Editor Buku Anak

Ruang kelas telah menyita suatu periode dalam kehidupan Rafiq atas nama masa depan. Periode ini rawan sesak karena kelas memiliki aturannya sendiri. Di kelas ada sang penguasa (guru), ada dewan perwakilan murid (ketua kelas), ada gambar-gambar pahlawan nasional, foto presiden dan wakilnya, serta simbol garuda pancasila. Di kelas, para murid dilarang berbicara kecuali diizinkan, posisi duduk diatur, pakaian diatur, penampilan diatur. Bola, kelereng, dan stik yang biasanya jadi teman ramah di rumah juga tiba-tiba berubah menjadi barang haram saat berada di kelas. Jadi, tidak usah kita bayangkan berapa kali lagi Rafiq harus memikirkan permainan menyenangkan demi mengusir kebosanannya di kelas.

Yang Datang dan Hilang dari Kelas

Kita lebih ingat kelas sebagai "tempat" ketimbang sarana penularan ilmu pengetahuan. Kelas sering kali gagal merebut perhatian murid dengan keseruan pengetahuan. Hal ini menjadikan kehidupan bersekolah seolah jadi takdir yang harus dijalani anak belaka. Namun, di masa-masa kita harus dipisahkan dari kelas seperti ini, mengapa banyak keluhan yang datang seolah anak-anak dipisahkan dari pengetahuan?

Aku teringat sebuah liputan yang ditayangkan oleh TVONE beberapa waktu lalu. Liputan tersebut menampilkan seorang pejabat kabupaten Banjarnegara yang mengeluhkan penundaan sekolah tatap muka akibat pandemi. Proses pendidikan dianggap mandek meski aku yakin dia tahu bahwa para murid bukanlah sedang berlibur di rumah. Guru-guru mereka juga masih mengajar dengan berbagai cara.

Sejak tak sengaja menonton cuplikan wawancara itu, pernyataannya berhasil menimbulkan pertanyaan di kepalaku: apa yang hilang dari pembelajaran tanpa kelas? Kenapa justru sedikit sekali yang mencerca kurikulum dan metode pengajaran yang tidak adaptif dengan situasi pandemi, jaminan ketersediaan alat pembelajaran, serta kuota internet bagi para murid? Bagaimana bisa ketidakhadiran ruang kelas dianggap sebagai keruntuhan pendidikan?

Kelas dalam wujudnya yang sekarang ini baru hadir di Indonesia sekira seabad yang lalu. Ruang belajar bermeja, berkursi, dan memiliki otoritas sendiri ini adalah sebuah revolusi besar. Kemunculannya di Hindia-Belanda pada awal abad ke-20 dianggap langkah awal menuju peradaban modern. Namun yang mengejutkan, Bapak Pendidikan kita sekaligus Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara, justru menjauhi konsep kelas modern semacam ini. Dalam esainya yang ditulis untuk majalah Wasita seri pertama No. 2 tahun 1928, Ki Hajar lebih memilih pengajaran dengan sistem yang dianggapnya tradisional, yaitu dengan sistem "paguron".

"Dari zaman dahulu hingga sekarang, bangsa kita mempunyai tempat-tempat pendidikan. Sekarang tempat-tempat itu disebut pawiyatan atau asrama. Tempat itu adalah rumah sang guru (paguron), sekaligus tempat tinggal murid-murid, dan digunakan sebagai tempat untuk mengajar. Karena guru dan murid hidup bersama siang dan malam, tentu saja pendidikan moral dan pengajaran intelektual jadi bersatu padu. Sekarang ini pondok digunakan semata-mata untuk pendidikan agama. Sementara pada zaman ketika pondok disebut asrama, yang diberikan di rumah-rumah guru bukan saja pengajaran agama, melainkan juga berbagai ilmu. Semua pengetahuan yang diperoleh guru dengan studi, baik Agama, Ilmu Bumi, Astronomi, Ilmu Hukum, Bahasa, Kesenian, maupun Ilmu Perang diteruskan ke anak didik." (dikutip dari Kenji Tsuchiya, KPG&Balai Pustaka 2019).

Dalam pengertian Ki Hajar Dewantara, "kelas" berada di tempat sang guru hidup. Sifat dan laku sang guru menjadi model pendidikan moral para murid. Begitulah pendidikan dan pengajaran berjalan seiring tumbuh kembang kehidupan para murid.

Namun, haruslah kita ingat bahwa kelas modern bukan disponsori oleh cita-cita hidup bebas dan merdeka sebagai manusia seperti prinsip Taman Siswa, "Sekolah modern merupakan proyek nasional raksasa yang dijalankan negara." (Saya Sasaki Shiraishi, 2009). Aturan di kelas dibuat sedemikian rupa untuk membentuk manusia yang sesuai dengan nilai-nilai moral negara (dan kebutuhan industri). Aturan-aturan yang tunduk pada ruang ini kemungkinan tak sukses diterapkan jika para murid tidak belajar di dalam ruang kelas.

Bagi mahasiswa harusnya tidaklah sulit berpisah dari ruang kelas, mengingat saat di kelas pun, para dosen tidak punya banyak hal yang cukup untuk dirindukan. Seingatku semasa berkuliah di UNS, biasanya dosen hanya akan duduk anteng sambil menjelaskan PPT-nya (yang sudah dia gunakan bertahun-tahun) sampai jam kuliah berakhir. Para mahasiswanya juga tak begitu berambisi untuk bertanya. Jadilah sesi tanya jawab itu sebagai ajang "dongeng keluarga" para dosen. Kalau kondisi kelasmu masih sama seperti yang terjadi padaku bertahun lalu, tak usah bersedih karena tidak dapat menyaksikan dosen secara fisik di kelas. Bersedihlah karena kamu harus tetap menanggung biaya ruang kelas yang kosong itu, sementara kamu harus belajar di kamar rumahmu yang sepi dan dingin.

"Kalau masih enggak boleh masuk, ini anak-anak bisa lulus tapi otaknya masih kelas satu," ujar seorang pejabat kabupaten Banjarnegara.

Jalan Pendidikan Kita yang Meresahkan

Diskusi tentang *link and match* perguruan tinggi kembali mencuat setelah diwacanakan lagi pada Debat Pilpres Ketiga di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019). *Link and match* adalah konsep mengenai penghubungan dan penyambungan antara pendidikan dan dunia kerja. Konsep ini diperkenalkan secara resmi melalui PP No. 29 Tahun 1990 Pasal 29 Ayat 2 guna menyiapkan siswa SMK menjadi tenaga siap kerja. Pada 1993, Mendikbud Wardiman Djojonegoro menegaskan kembali konsep ini dan mengharuskan adanya relevansi pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja yang dikemas dalam bentuk pemagangan bagi siswa kejuruan. Pada tahun ajaran 1994/1995 di bawah Mendikbud Wardiman Djojonegoro sistem pemagangan secara resmi diterapkan di beberapa sekolah.

Dewasa ini, konsep *link and match* kembali hangat diperbincangkan karena peningkatan angka pengangguran di Indonesia. Sampai Februari 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran telah mencapai 8,75 juta orang. Jumlah itu tidak hanya dipenuhi oleh orang lulusan sekolah dasar, sekolah menengah, atau orang yang tidak mengenyam pendidikan. Namun, banyak lulusan perguruan tinggi yang juga menjadi 'pengangguran elite'. Pemerintah mulai melihat bahwa tingginya angka pengangguran itu disebabkan oleh ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja.

Pasang surut program *link and match* pendidikan terlihat pada beberapa peraturan dan keputusan pemerintah yang dibuat sejak 1994. Pada April 1994, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyetujui kerja sama pelaksanaan magang siswa SMK. Tahun 1997, Majelis Pendidikan Kejuruan Provinsi DKI Jakarta melakukan sertifikasi SMK dengan tujuan memperkenalkan kebijakan *link and match* ke masyarakat. Tahun 2003, Menteri Riset dan Teknologi merencanakan *link and match* antara SMK dengan UKM. Tahun 2005-2012, Joko Sutrisno sebagai Direktur Pembinaan SMK menerapkan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001:2008. Tahun 2017, Kementerian Perindustrian menerapkan 35 program studi yang dibutuhkan industri pada kurikulum SMK. Hingga tahun 2018, *link and match* mulai menyentil sekolah vokasi dan pada Januari 2020 mulai memasuki perguruan tinggi melalui program "Kampus Merdeka".

Jika dimaknai secara kasar, paradigma *link and match* ini mengharuskan lembaga pendidikan untuk melakukan penyesuaian dengan kebutuhan tenaga kerja di industri. Lembaga pendidikan harus melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan industri. Dengan demikian, lulusan perguruan tinggi dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan tidak ada lagi 'pengangguran elite' yang merepotkan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat antusias mendorong program ini. Bahkan, kampus-kampus giat bersaing untuk menggandeng perusahaan besar sebagai mitra industrinya. Semakin besar keterlibatan industri, maka lembaga pendidikan itu semakin dikenal dan dipercaya masyarakat.

Paradigma itu membuat beberapa orang mulai meragukan apakah sistem pendidikan kita berjalan ke arah yang benar. Terlintas pemikiran bahwa pendidikan adalah ajang mencari kerja dan sekolah adalah produsen tenaga kerja.

Hal ini mengakibatkan orientasi pendidikan yang semula untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kini berubah arah menjadi menciptakan manusia yang "siap pakai".

Arah pendidikan akan semakin melenceng jauh, ketika paradigma pendidikan sebagai produsen tenaga kerja semakin deras menjangkiti masyarakat dan pengambil kebijakan pendidikan di Indonesia. Tentu saja, *link and match* melahirkan lulusan yang siap pakai dan kompeten di bidangnya. Akan tetapi, bisa saja mereka hanya mahir menjalankan perintah dan tidak bisa merefleksikan ilmunya pada masalah sosial yang kian kompleks. Hal ini terjadi karena pendidikan hanya disiapkan untuk dunia kerja, bukan untuk menciptakan kemandirian sosial dan peningkatan kualitas diri.

"Program ini akan melahirkan mahasiswa pekerja, bukan mahasiswa pemikir."

Kemudian, pola pikir industrialisasi juga merupakan ancaman yang bisa merobohkan kerangka pendidikan kita. Hukum pasar yang berlaku di dunia industri bisa saja perlahan merebak dalam dunia pendidikan. Dalam konteks perkuliahan, sesuai dengan hukum penawaran-permintaan, fakultas atau jurusan yang paling banyak terserap di industri akan menjadi primadona. Sementara fakultas atau jurusan yang tidak memiliki prospek kerja dan nilai jual yang jelas akan terancam gulung tikar karena sepi peminat (Sindhunata, 2000). Hal tersebut kontradiktif dengan tujuan terbentuknya universitas, yang sesuai namanya dibentuk untuk menghasilkan manusia berpengetahuan universal atau menyeluruh. Apalagi saat ini, program Kampus Merdeka memberikan otonomi kepada PTN dan PTS untuk membuka program studi baru dengan syarat sudah menjalin kerja sama dengan perusahaan. Bahkan ditegaskan bahwa kerja sama dengan perusahaan mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penempatan kerja. Peraturan ini memperlebar karpet merah keterlibatan industri yang bisa saja menodai tujuan pendidikan itu sendiri.

Penerapan dari *link and match* dikhawatirkan akan membawa kekecewaan pada hakikat pendidikan di bangsa kita. Pendidikan sepatutnya didudukkan sebagai tempat pembebasan berpikir setiap manusia muda untuk mengembangkan potensinya. Pendidikan haruslah menjadi sarana manusia mencapai nilai-nilai kebaikan dalam dirinya, bukan sekadar melahirkan tenaga terampil yang menyenangkan kapitalis besar. Mengutip Paulo Freire tentang model pendidikan humanisasinya, pendidikan harus memandang baik pendidik maupun peserta didiknya sebagai subyek. Peserta didik bukanlah obyek atau wadah yang bisa diisi dengan pengetahuan dan keterampilan secara paksa. Hanya dengan proses pembelajaran manusia ke manusia itu, pendidikan kembali ke tujuan awal, yaitu seperti kata Freire, sebagai wahana pembebasan.

Negara pun sudah memiliki rumusan sendiri mengenai tujuan pendidikan nasional. Mengintip UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan lain yang dibutuhkan diri dan lingkungannya. Tentu saja, tujuan menciptakan tenaga kerja tak menjadi salah satunya. Oleh karena itu, apabila ada yang perlu diperbaiki dari pendidikan kita, tak lain adalah cara kita memandang pendidikan sebagai tempat mencetak tenaga kerja untuk kebutuhan pasar. Pendidikan seharusnya dilihat sebagai tempat membahagiakan, di mana setiap anak bebas berpikir dan menemukan nilai-nilai dirinya sebagai individu yang bebas.

Hesty Safitri
Pemimpin Umum LPM Kentingan periode 2020-2021

D'Sobahan Resort: Taman Bermain Berpadu Penginapan

Oleh: Atif Kasful Haq

Gambar: Dokumentasi Pengunjung

Ngadirejo yang terletak di Kabupaten Temanggung mungkin bukan merupakan nama yang akan disebut ketika membicarakan penginapan di kota tembakau ini. Nama-nama seperti Aliyana maupun Indraloka yang terletak dekat dengan pusat kota sudah terlanjur menjadi primadona. Ngadirejo pun hanya banyak menggaungkan objek wisata seperti Jumprit atau Liyangan. Di tengah kenyataan seperti itu, nama D'Sobahan Resort sebagai penginapan sekaligus taman wisata yang hadir di desa Sobahan, Kecamatan Ngadirejo tentu terdengar cukup spesial.

D'Sobahan resmi dibuka pada tahun 2019 lalu. Kehadirannya merupakan inisiasi dari seorang warga desa sekaligus pengusaha furnitur bernama Falintinus Sukendra. Diawali dengan sebuah keinginan dari orang tua beliau untuk memberdayakan masyarakat sekitar, kemudian direncanakan sarana yang dapat menampung secara tepat impian itu. Hingga akhirnya diputuskanlah untuk membangun penginapan dan wisata wahana di salah satu sudut desa dengan pendanaan dari kantong pribadi Falintinus Sukendra. Harapannya, warga sekitar bisa mendapat manfaat dan lapangan kerja dari tempat tersebut.

Pada awal pembukaan, tempat ini tampak terkesan kecil dan sederhana. Hanya ada tenda kecil yang menjadi pembatas antara area parkir dan halaman utama. Beberapa wahana memang sudah tersaji, bahkan bangunan tempat penginapan pun telah berdiri. Namun ada banyak pula fasilitas yang masih dalam tahap pembangunan, seperti kolam renang yang kala itu masih berupa rangka dan lubang tak berisi. Jalannya konstruksi pun terkesan perlahan dan baru bisa digenjot beberapa bulan kemudian.

"Salah satunya karena hanya diambil dari dana pribadi. Lalu kita lihat juga pasarannya, kalau dibuat yang gede, tapi peminatnya malah sedikit, nanti jatuhnya malah cuman di perawatan, kan enggak imbang. Makanya kita bangun pelan-pelan dan banyak evaluasi," jelas Kristiyo lebih lanjut.

Memasuki pertengahan 2021, telah banyak peningkatan maupun penambahan fasilitas dan prasarana di D'Sobahan. Di area depan, pengunjung akan menjumpai pintu masuk dengan hiasan bola dunia besar di atasnya. Masuk ke dalam, di sebelah kiri terdapat beberapa saung yang ditemani sebuah patung kerbau dan petani. Alat-alat olahraga juga dipasang di salah satu sudut dekat saung. Pada bagian tengah, pihak pengelola memilih menambahkan tenda beserta tempat duduk sebagai tempat istirahat.

Bila diperhatikan, desain tempat ini merupakan perpaduan konsep industrial dan pedesaan dengan sang pemilik, Falintinus Sukendra sendiri sebagai perancangnya. Harmonisasi antara dua kutub berbeda dapat dilihat jelas pada realisasi pembangunannya. Gaya industrial diwakili beberapa bangunan berbentuk kargo kontainer yang menjadi rupa luar sejumlah bangunan, termasuk penginapan utamanya. Lokasi yang dekat dengan areal persawahan dan saung-saung menjadi perwakilan dari representasi suasana pedesaan.

Untuk wahana, kolam renang tampak menjadi pilihan utama pengunjung di sana. Dua kolam berukuran kecil dan sedang yang ditambah perosotan terlihat selalu ramai, terutama oleh anak-anak dari lingkungan sekitar. Di samping itu, terdapat pula kolam lain yang menampung wahana bebek air dengan ketentuan *booking* sebelum penggunaan. Tak lupa, ada Trek ATV yang ditempatkan pada bagian terluar area D'Sobahan.

"Ya, fasilitasnya lumayan, ada taman dan ada banyak permainan yang bikin enggak jenuh. Kolamnya juga dikhususkan untuk anak-anak, airnya bersih dan tidak bau kaporit. Dengan ini semua, kesannya jadi anak-anak itu tidak harus main jauh, yang dekat di sini dengan harga terjangkau sudah ada," terang Dyah Retno, salah satu pengunjung.

Sekalipun banyak orang yang merasa telah cukup nyaman dengan berbagai hal yang ditawarkan di D'Sobahan, pihak pengelola D'Sobahan Resort tidak memungkiri akan perlunya perkembangan serta perluasan ke depannya. Beberapa di an-

taranya seperti penambahan kolam renang, kios untuk UMKM, dan bangunan penginapan yang diperbanyak. Sejalan dengan hal itu, beberapa pengunjung juga merasa bahwa sudah saatnya penambahan fasilitas di D'Sobahan dilakukan.

"Agak kurang di kolamnya yang baru dua dan masih kecil-kecil, mungkin bisa ditambah untuk ukuran mereka yang sudah dewasa dan remaja," ujar Tia.

Hadirnya D'Sobahan di tengah masyarakat pedesaan juga diikuti dengan biaya tiket masuk yang cukup terjangkau. Pada hari Senin hingga Kamis, pengunjung dapat masuk dengan membayar uang sejumlah Rp8.000,00. Sementara di hari Sabtu dan Minggu, harga tiket dikenai tarif Rp10.000,00. Adapun untuk hari Jumat, tempat ini ditutup.

Selama masa pandemi, D'Sobahan Resort sempat tutup untuk beberapa saat (termasuk dimanfaatkan untuk pembangunan) sampai akhirnya dibuka kembali dengan akses pengunjung dibatasi empat puluh orang. Pengunjung perlu menunggu di luar apabila kapasitas di dalam telah penuh dan keluar masuk secara bergantian. Selain itu, protokol kesehatan diberlakukan secara disiplin bagi para pengunjung maupun karyawan D'Sobahan Resort.

Layanan penginapan tentu tidak dapat dilupakan, apalagi mengingat pada nama belakangnya ditambah pula embel-embel *resort*. Walaupun nyatanya lebih banyak orang yang datang hanya untuk sekadar bermain wahana, bukan berarti penginapannya dinomorduakan. Bahkan, peningkatan kualitas kamar pun masih kerap dilakukan. Seperti baru-baru ini, dua kargo kontainer yang sebelumnya dipisah dan diletakkan sejajar di tanah akhirnya disatukan menjadi bangunan dua lantai. Warna catnya pun ikut diganti menjadi kombinasi warna hitam dan kuning.

Fasilitas yang diberikan di penginapan cukup lengkap, mulai dari sofa, *spring bed, water heater,* air hangat, televisi, hingga WiFi gratis. Segala wahana seperti kolam renang pun menjadi tambahan fasilitas yang dapat langsung diakses. Tak lupa disediakan juga *welcome drink* serta menu sarapan dengan pilihan nasi rames beserta ingkung ayam dan nasi megono dengan tambahan lauk gorengan.

Untuk menginap dan merasakan fasilitas yang disediakan, pihak pengelola menawarkan dua pilihan harga sewa tempat penginapan per malamnya. Bila hanya sekadar menggunakan kamar di lantai bawah, maka dikenakan tarif Rp250.000,00, sedangkan penggunaan kamar atas dan bawah akan diberi tarif sejumlah Rp600.000,00.

D'Sobahan Resort pada akhirnya dapat dikatakan sebagai sebuah oasis baru yang cukup segar. Bagi warga sekitar, tempat tersebut menjadi taman bermain yang terjangkau. Namun tak hanya sebatas pada keperluan hiburan, tempat ini juga menyediakan lapangan pekerjaan, ditambah dengan adanya prospek ke depan untuk membuka kios UMKM. Bagi para pelancong, D'Sobahan bisa masuk ke dalam pilihan yang baik untuk merehatkan badan, barangkali satu atau dua malam sembari menikmati kawasan Ngadirejo.

LPM KENTINGAN

Mengucapkan selamat dan sukses atas wisudanya

Irfan Sholeh Fauzi, S.Pd.
Staf Redaksi Periode 2018

Ridha Maharani, S.Pd.
Staf Perusahaan Periode 2018

Aditya Prabowo, S.I.Kom.
Staf Redaksi Periode 2017

Azlia Amira Putri, S.H.
Staf Perusahaan Periode 2017

Agista Rinjani Khairunnisa, S.I.Kom.
Staf Perusahaan Periode 2018

Aulia Fitriana, S.Hum.
Sekretaris Umum Periode 2019

Desi Rahmawati, S.Pd.
Staf PSDM Periode 2018

Anggi Purnamasari Yulianto, S. I. Kom.
Staf Perusahaan Periode 2018

Muhammad Zuhri, S. I. Kom.
Staf Perusahaan Periode 2018

Stephanie Theora Agatha, S. I. Kom.
Staf Redaksi Periode 2019

Nirmala Eka Maharani, S. S.
Staf Perusahaan Periode 2019

Fatimah Farchana, S. Ds.
Wasekum Bidang Inventarisasi Periode 2019

Ritcia Antonni, S.S.
Staf PSDM Periode 2020

Nun Fatimarahim, S.I.Kom.
Pemimpin PSDM Periode 2019

Abi Rizki Alviandri, S.T.
Pemimpin Umum Periode 2020

Lulu Febriana Damayanti, S.Pd.
Pemimpin Redaksi Periode 2020

Titi Cahyanti, S. Tr.Sos.
Staf Riset Periode 2020

Cahyanti Nawangsari, S.Sos.
Pemimpin PSDM Periode 2020

Muhammad Irfan Julyusman, S.Tr.Sos.
Redaktur Fotografi Periode 2020

Nabilah Al Hafidhoh, S.Pd.
Staf Riset Periode 2019

Rica Meilana Rochilah,S.Pd.
Staf Perusahaan Periode 2019

Menilik Pembangunan Tower UNS: Menara 11 Lantai

Oleh: Carelya Griselda dan Rozaq Nur Hidayat

Universitas Sebelas Maret (UNS) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di kota Surakarta. UNS yang dulunya bersatus PTN BLU (Badan Layanan Umum) kini berubah menjadi PTN-BH (Badan Hukum). Perubahan status UNS menjadi PTN-BH secara resmi tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa, 6 Oktober 2020. Perubahan status UNS menjadi PTN-BH tersebut membawa dampak yang cukup besar, baik di bidang struktural, administrasi, maupun kultural UNS. Salah satu perubahan di bidang struktural adalah UNS melakukan pembangunan menara, yakni Tower UNS.

Pembangunan Tower UNS ini ditandai dengan peletakan batu pertama (*ground breaking*) yang dihadiri langsung oleh Rektor UNS, Jamal Wiwoho, beserta seluruh Wakil Rektor, Dirjen Pendidikan Sekolah Vokasi Kemendikbud, Wikan Sakarinto, dekan dan direktur di lingkungan kampus UNS, serta perwakilan warga sekitar pada hari Jumat, 28 Mei 2021. Pembangunan Tower UNS sendiri bertujuan untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki UNS. Nantinya, selain diperuntukkan sebagai rumah dinas rektor, Tower UNS juga dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti sarana olahraga, *international conference*, *central business*, serta terdapat ruang-ruang untuk menunjang *revenue generation*.

Gambar: Pekerja sedang mengoperasikan *crane* (06/07/2021) –Rozaq Nur Hidayat/LPM Kentingan

Gambar: Pekerja sedang membongkar muatan bahan konstruksi (06/07/2021)
-Rozaq Nur Hidayat/LPM Kentingan

Dalam Diskusi Terbuka MWA UM UNS, Ketua BEM UNS, Zakky Musthofa Zuhad menyampaikan, manajemen dari Tower UNS diharapkan berpihak kepada mahasiswa. "Dalam perencanaanya itu, di lantai kedua akan ada kolam renang, *gym*, dan sebagainya. Harapannya, fasilitas tersebut dapat diakses dengan mudah oleh kita sebagai mahasiswa UNS. Misal fasilitas tersebut akan dikomersilkan, tarif untuk umum adalah Rp100.000,00 dan tarif untuk mahasiswa UNS adalah Rp10.000,00 atau Rp5.000,00 bahkan gratis," ujar Zakky dalam diskusi terbuka tersebut pada Senin, 9 Agustus 2021.

Beberapa mahasiswa UNS juga menanggapi pembangunan Tower UNS. Mahasiswa merasa kecewa terhadap UNS yang menunda pembangunan kampus cabang, termasuk pembangunan dan penyetaraan fasilitas kampus cabang yang direncanakan selesai tahun 2021 ini. "Adil enggak *sih* jika fasilitas belum merata, justru membangun *tower?*" ujar Michelle, mahasiswa Kampus 4 UNS.

Terlepas dari berbagai tanggapan para mahasiswa UNS, proyek pembangunan Tower UNS akan tetap berjalan. Pembangunan di atas lahan seluas 5.000 meter persegi dengan tinggi bangunan 76 meter ini ditargetkan selesai pada akhir tahun (31 Desember 2021). PT PP (Persero) Tbk adalah kontraktor pelaksana pembangunan Tower UNS. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan pada laman LPSE UNS, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan pembangunan gedung Tower UNS 2021 menelan anggaran dari APBN 2021 dengan nilai pagu paket sebesar Rp141.367.235.000,00. Proses pembangunan Tower UNS ini termasuk ke dalam kategori yang cepat karena mengerahkan banyak pekerja dan dilakukan nonstop selama 24 jam. Untuk menjaga keselamatan, para pekerja pembangunan Tower UNS menerapkan K3 (Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja) dengan memakai masker, helm keamanan sepatu, sarung tangan, dan rompi keamanan.

Gambar: Pekerja sedang memasang hebel (10/07/2021) –Carelya Griselda/LPM Kentingan

Gambar: Pekerja sedang mengikat bahan konstruksi (10/07/2021) –Carelya Griselda/LPM Kentingan

Gambar: Pekerja sedang mengoperasikan *theodolite/total station* (10/07/2021) –Carelya Griselda/LPM Kentingan

Gambar: Penggalian tanah menggunakan ekskavator (10/07/2021) –Carelya Griselda/LPM Kentingan

Masih Adakah yang Mengganjal dalam Benak Mahasiswa Terkait MWA UM UNS?

Oleh: Alisya Zahna Fadila

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTN-BH merupakan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang dikemas dalam *cover* baru berbentuk PTN-BH. Dalam perguruan tinggi, status PTN-BH memiliki kedudukan tertinggi sebagai badan hukum publik yang otonom. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020, Universitas Sebelas Maret menjadi universitas ke-12 yang beralih status dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Setelah penetapan status perguruan tinggi itu, pihak kampus segera mengoordinasi pembentukan susunan organisasi baru. Salah satu kelembagaan baru pada organisasi tersebut bernama Majelis Wali Amanat (MWA) yang mana merupakan lembaga tertinggi di PTN-BH. MWA UNS beranggotakan tujuh belas orang termasuk MWA Unsur Mahasiswa (UM).

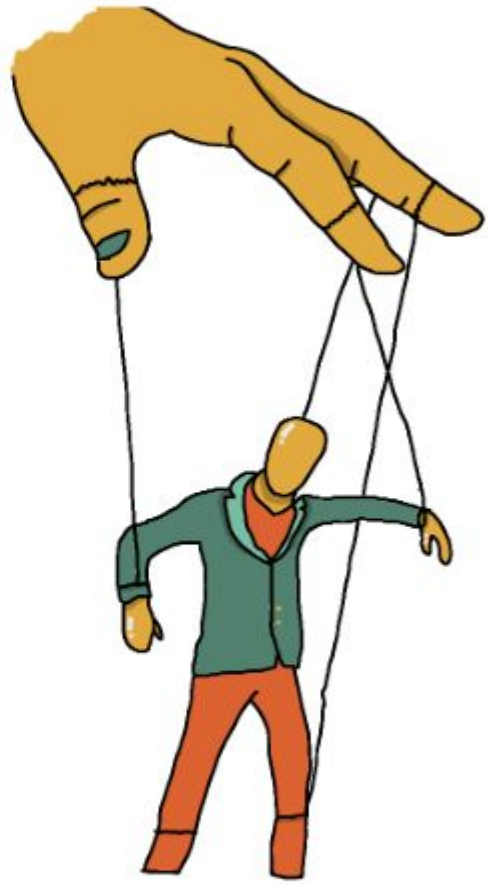

Ilustrasi: Rizky Setiawan

Apa, sih, MWA UM itu?

Berdasarkan PP No. 56 Majelis Wali Amanat Pasal 25 Ayat (1), Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, pelaksanaan umum, dan pengawasan nonakademik. Lembaga tertinggi dalam PTN-BH ini beranggotakan 17 orang yang terdiri dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Rektor UNS, Ketua Senat Akademik (SA), 4 orang wakil masyarakat, 7 anggota SA, dan 3 orang perwakilan lain yang meliputi: 1 wakil dari alumni, 1 tenaga akademik, serta 1 wakil dari unsur mahasiswa. Penetapan struktur organisasi dalam MWA ini dilakukan melalui proses musyawarah mufakat yang dihadiri oleh para petinggi UNS.

Majelis Wali Amanat sendiri diketuai oleh Marsekal Hadi Tjahjanto, yang merupakan seorang panglima TNI. Sebelum diberi tanggung jawab sebagai ketua, Marsekal Hadi Tjahjanto menjabat sebagai Ketua Dewan Penyantun UNS. Sementara itu, sebagai Wakil Ketua MWA UNS, dipilihlah Hasan Fauzi dan Tri Atmojo Kusumaryadi sebagai Sekretaris MWA UNS.

Adapun tugas-tugas dari Majelis Wali Amanat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 meliputi:

1. Menyetujui usul perubahan statuta UNS;
2. Menetapkan kebijakan umum UNS;
3. Mengesahkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan;
4. Mengangkat dan memberhentikan rektor;
5. Mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota KA;
6. Mengangkat dan memberhentikan anggota kehormatan MWA;
7. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNS;
8. Melakukan penilaian tahunan terhadap kinerja rektor
9. Membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh organ lain;
10. Membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UNS;
11. Memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan; dan
12. Mengatur hubungan antar organ UNS.

Mari Mengenal Lebih Dalam tentang MWA UM dan BK MWA UM

Sudah cukup lama sejak penetapan UNS sebagai PTN-BH dan pembentukan badan koordinasi termasuk pemilihan anggota MWA UM. Akan tetapi, tampaknya masih banyak mahasiswa UNS yang belum mengetahui hal tersebut, seperti Dwi Suci, mahasiswa Ilmu Komunikasi yang baru pertama kali mendengar ataupun membaca istilah MWA UM. Lain halnya dengan Aga. Mahasiswa Fakultas Teknik ini tahu mengenai MWA UM melalui media sosial Instagram. Saat bermain media sosial tersebut, dia mengaku tidak sengaja menemukan akun Instagram dari MWA UM di linimasa.

Mahasiswa dalam lapisan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret diwakili oleh seorang Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa yang kemudian disebut sebagai MWA UM. Pemilihan MWA UM dikoordinasi oleh Biro Kemahasiswaan bersama dengan perwakilan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) melalui Zoom Cloud Meeting pada bulan Oktober tahun 2020 lalu. Menurut pernyataan Kuncoro Diharjo pada salah satu laman UNS, proses pemilihan MWA UM dipercaya dapat berjalan secara terbuka dan demokratis. Selama berlangsungnya pemilihan anggota MWA UM, terdapat prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh Ormawa. Prinsip tersebut di antaranya adalah menjunjung tinggi asas demokrasi, partisipatif dengan dipilih dari dan untuk mahasiswa menurut ketetapan yang disepakati, transparan, mengutamakan akuntabilitas, dan dijalankan secara efektif. Masa jabatan MWA Unsur Mahasiswa sendiri hanya berlaku selama satu tahun dan tidak dapat dipilih kembali pada tahun berikutnya.

Dalam menjalankan tugasnya, MWA UM dibantu oleh Badan Kelengkapan Unsur Mahasiswa atau BK MWA UM. Badan tersebut memiliki beberapa program kerja guna memaksimalkan peran MWA UM dalam menjangkau beberapa dimensi mahasiswa untuk menyelaraskan kebijakan kampus. Badan kelengkapan ini terdiri atas beberapa kepala bidang dan staf. Ada Sekretaris Jendral yang bertanggung jawab dalam administrasi dan keuangan serta *controlling* dan *evaluating* keberjalanan BK MWA UM. Adapun Bidang Kajian dan Strategi mempunyai fungsi utama dalam mengkaji isu kebijakan kampus melalui kajian dan diskusi serta berperan dalam membuat poin rekomendasi kebijakan terhadap isu yang sedang diangkat. Selain itu, ada pula bidang Humas yang bertanggung jawab untuk membangun hubungan dengan seluruh mahasiswa, MWA unsur lain dan pimpinan UNS serta berperan untuk menjaga dan mencari relasi. Terakhir, ada bidang Media dan Informasi yang bertanggung jawab membangun citra BK MWA UM secara visual dan memiliki peran untuk mengemas informasi terkait dengan MWA UM. Berbagai program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BK MW UNS UM di antaranya adalah melakukan diskusi terbuka dan *sharing*, kunjungan, serta rapat kerja.

Selama ditetapkan menjadi PTN-BH, UNS telah melakukan dua kali pemilihan MWA Unsur Mahasiswa. Muhammad Zainal Arifin, mahasiswa Teknik Sipil angkatan 2016, terpilih sebagai MWA UM pada tahun 2020. Kemudian, tanggung jawab tersebut diserahkan kepada Zakky Musthofa Zuhad yang dipercayai untuk menjadi MWA UM tahun 2021.

Polemik MWA UM dan Badan Kelengkapannya

Dalam suatu proses perubahan dan pembentukan pastilah ada polemik di dalamnya. Perubahan status UNS menjadi PTN-BH hingga

pemilihan MWA Unsur Mahasiswa menimbulkan pro dan kontra di kalangan mahasiswa. Kebenaran informasi dan transparansi masih belum banyak diketahui oleh mahasiswa umum UNS.

Berbagai persoalan yang diperdebatkan oleh si pro dan kontra sepertinya belum menemukan titik terang. Hal ini ditandai dengan aksi keluarnya BEM FISIP dari forum yang diikuti oleh beberapa ketua BEM dan DEMA dari fakultas lain saat proses pemilihan MWA UM. Alasan yang diutarakan oleh presiden BEM FISIP kenapa memilih untuk *walkout* diantaranya:

1. Musyawarah mengkhianati komitmen dan kesepakatan konsolidasi di hari sebelumnya untuk menolak segala bentuk intervensi dari kampus.
2. Perumusan yang terkesan terburu-buru dan kurang adanya upaya pelibatan publik serta sosialisasi yang lebih masif.
3. Informasi yang sangat terbatas dan tertutup sehingga kurang diketahui mahasiswa umum.

Akan tetapi, kejadian tersebut secara representatif tetap memenuhi kuorum dalam pemilihan. Tidak tercapainya kata mufakat dalam musyawarah tersebut berakhir dengan *voting*. Firmansyah Adi Nugroho, Menteri Analisis Kampus dan Pendidikan Tinggi beranggapan bahwa pemilihan tersebut sudah memenuhi syarat jika ditinjau dari segi musyawarah mahasiswa terbuka. Namun, jika ditinjau dari segi administratif belum dapat dikatakan memenuhi syarat karena musyawarah mahasiswa UNS secara peraturan KBN harus diselenggarakan oleh DEMA. Nugroho menambahkan bahwa pada kenyataanya musyawarah tersebut diinisiasi oleh BEM.

Polemik lain pun timbul karena ada berita yang beredar mengenai BK MWA UNS UM yang digaji. Beberapa mahasiswa menyatakan kontra mengenai isu tersebut. Salah satunya yaitu Muhammad Adi Firmansyah, salah satu mahasiswa Teknik. Adi berpendapat bahwa hal tersebut membuat kita berpikir multitafsir karena tidak dijelaskan secara detail tujuan dari penggajian itu untuk apa. Berbeda dengan Adi, Putri Surya Pratiwi, Mahasiswa Fakultas SV menanggapi dengan positif mengenai BK MWA UNS UM yang digaji. "Menurutku, gaji untuk BK MWA UNS UM boleh dan wajar saja karena mereka telah mengorbankan banyak hal, seperti waktu dan tenaga mereka, apalagi mereka sebagai penyalur dan juga bertugas mengawasi," ujar Putri.

Menteri AKPT meluruskan bahwa bukan BK MWA UNS UM yang digaji, melainkan MWA UNS UM. Gaji tersebut pun hanya diberikan setiap menghadiri rapat, bukan gaji setiap bulan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa uang tersebut diberikan seperti sebuah uang komisi.

Selain mengenai digajinya BK MWA UNS UM, rangkap jabatan yang dilakukan oleh Zakky Musthofa Zuhad sebagai Presiden BEM UNS 2021 sekaligus MWA UM pada tahun yang sama juga menimbulkan polemik. Hal ini tentunya menimbulkan perdebatan di kalangan mahasiswa mengingat program kerja yang dilakukan oleh BEM terkadang bertentangan dengan universitas sendiri. Namun dari musyawarah pemilihan MWA UM yang berakhir *voting*, lebih dari lima puluh persen partisipan memilih Zakky Musthofa Zuhad atau yang akrab dipanggil Zakky ini sebagai perwakilan unsur mahasiswa pada MWA.

Terjadinya rangkap jabatan ini menimbulkan tanda tanya, seperti yang diutarakan oleh Arieska Kurnia, mahasiswa Fakultas FEB. "Menurut pendapat pribadi, sebagai pihak lain, kalau dilihat dari perannya dalam menelaah kebijakan kampus, menyejahterakan mahasiswa memang ada yang sejalan. Dari BEM universitas sendiri mempunyai program kerja atau pergerakan yang terkadang bertentangan dengan pihak kampus, sedangkan MWA UM memiliki kebijakan yang tertinggi. Saya tidak terlalu paham mengenai mekanisme yang benar seperti apa. Kalau dari sudut pandang saya, untuk kita mahasiswa yang melihat kurang saja," tutur Arieska.

Terkait polemik dan perdebatan yang terjadi akibat pemikiran dan pendapat yang berbeda, yang pasti semua ingin yang terbaik untuk Universitas Sebelas Maret. Semua kekhawatiran yang ada pasti mendasar dan sepertinya perlu dipikirkan lebih dalam lagi supaya khalayak yang awam lebih memahami hal tersebut dan mengetahui apa yang terjadi.

Tanggapan dan Harapan untuk MWA UM 2021

- **Firmansyah Adi Nugroho (Menteri Analisis Kampus dan Pendidikan Tinggi)**

Nugroho menyampaikan dua harapan terkait MWA UNS UM 2021

1. Untuk saat ini, segera ditindaklanjuti saja mengenai garapan DEMA terkait peraturan mekanisme pemilihan MWA

UNS UM. Dengan demikian, ketika landasan hukum dari pemilihan MWA UNS UM sudah diserahkan sebagai PMWA dapat dipertanggungjawabkan baik secara anggaran maupun administrasi.

2. Kedudukan MWA UNS UM pada forum besar harus ditata kembali karena masih rancu. Dalam artian, seperti apa posisi MWA UM dan BK MWA UM saat berada di forum besar haruslah jelas. Hal ini karena terkadang mereka ada di pihak kampus dan terkadang juga berada di pihak mahasiswa. Maksudnya memihak mahasiswa, tetapi tidak turun secara langsung, padahal memiliki akses lebih.

- **Brilyan Duta Nuswantoro (Presiden BEM FISIP 2020)**

"Harapan saya, lebih disusun secara matang terkait mekanisme pemilihan MWA UM ini. Saya menunggu iktikad baik dari DEMA UNS sebagai lembaga yang berwenang untuk menyusun mekanisme ini. Jika ditinjau dari media sosial dan secara nyata, saya belum melihat upayanya karena menurut saya lembaga ini telah gagal dalam menjalankan tugasnya. Terlihat dalam pemilihan MWA UM 2020 dan dalam menjalankan tugasnya pun kurang terlihat transparansi."

- **Agapeano Aditama (Mahasiswa Teknik Kimia)**

"Kalau secara persepsi organisasi, MWA sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi kalau dari mahasiswa, menurutku belum karena dengan menyandang status sebagai PTN-BH, kampus jadi lebih mandiri dalam hal keuangan. Ini dapat dilihat dari kebijakan kuota SPMB mandiri yang meningkat. Tetapi, di samping itu banyak juga kebijakan pengganti agar UNS tidak terlihat seperti 'kampus korporat'. Jadi kesimpulannya, dari sudut pandang organisasi sudah berjalan dengan baik. Namun, untuk sudut pandang mahasiswa belum, terutama bagi mahasiswa yang awam dengan kampus UNS. Lalu, harapannya semoga MWA dapat amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan."

- **Florensius Kitaro (Mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin)**

"Semoga MWA UM dapat menjadi wadah penyalur aspirasi mahasiswa kepada universitas. Harapannya, MWA UM dapat menjalankan tugas dan prokernya dengan baik, menyepakati hal-hal yang diperlukan untuk UNS ke depannya serta memikirkan terkait peraturan dan kebijakan kampus yang sesuai dan baik untuk bersama."

"Bukan hanya menerima hasilnya, tetapi semua orang juga berhak untuk menyuarakan pendapatnya dengan baik dan bijak."

Gambar: Surakarta, Jumat 2 Juli 2021 – Bus Kampus UNS Solo beroperasi di dalam kampus pada hari UNS Bebas Emisi. –Khaira Fadia Thoriq/LPM Kentingan

Bus Kampus dalam *Green Campus*

Oleh: Annisa Khusna Amalia

Efektifkah bus kampus selama ini di tengah banyaknya transportasi pribadi civitas academica UNS?

Eksistensi bus sebagai transportasi umum jelas tak dapat disepelekan. Tak sedikit dari masyarakat yang menjadikan bus sebagai transportasi utama mereka dalam berkegiatan. Hal ini karena bus sendiri dapat melakukan perjalanan jarak jauh atau dekat dengan kapasitas besar maupun kecil serta fasilitas lengkap atau seadanya. Banyaknya jenis bus sesuai dengan kebutuhan menjadikannya salah satu transportasi umum yang tak dapat ditinggalkan meskipun sebagian masyarakat telah memiliki transportasi pribadinya sendiri.

Mobilisasi dalam Kampus

Mobilisasi jelas perlu dilakukan oleh semua orang di mana pun dan kapan pun, tanpa terkecuali untuk para *civitas academica* Universitas Sebelas Maret (UNS). Bus kampus dapat dikatakan menjadi salah satu alternatif transportasi yang membantu *civitas academica* dalam melakukan mobilisasi. UNS sendiri tergolong ke dalam *green campus* yaitu kampus yang peduli pada lingkungan. Jadi, penggunaan bus kampus dapat dikatakan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan oleh para *civitas academica*nya.

Kampus utama UNS berdiri di lahan berukuran lebih dari 60 hektare dengan struktur lahan yang bisa dibilang tidak datar. Ditambah lagi dengan bagaimana teriknya matahari dan panasnya udara di Surakarta, semua ini cukup membuat banyak orang lelah

saat melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain meskipun masih di dalam kampus dengan jarak dekat sekalipun.

"Lumayan membantu ya apalagi kalau buru-buru atau capek," jelas Rosma, salah satu mahasiswi FMIPA UNS yang pernah menggunakan bus kampus saat ditanya apakah adanya bus cukup membantunya dalam beraktivitas di kampus.

Pernyataan dari Rosma ini juga senada dengan penjelasan Azzizah, mahasiswi UNS lain yang juga pernah menggunakan bus kampus. "Adanya bus kampus efektif *aja*. Soalnya bus kampus bisa membantu mahasiswa yang tidak membawa kendaraan. Selain itu, dengan adanya bus kampus polusi udara juga bisa berkurang."

Selain dari kalangan mahasiswa, ternyata beberapa dosen juga memanfaatkan alat transportasi ini. Hal tersebut berdasarkan keterangan narasumber berinisial W yang mengatakan bahwa dosen dari luar kota yang melakukan perjalanan pulang-pergi menggunakan bus kampus saat melakukan kegiatannya di dalam kampus.

Perjalanan Panjang Bus

UNS memiliki armada bus sebanyak empat buah, di mana dua armada digunakan sebagai alat transportasi yang membantu mobilitas dalam kampus dan dua lainnya digunakan apabila *civitas academica* memerlukannya untuk kegiatan di luar. Bus kampus UNS ini telah melakukan perjalanan selama bertahun-tahun, setiap harinya dengan jam operasional dari pukul tujuh pagi hingga empat sore. Namun, pada kenyataannya bus lebih sering keluar garasi pada pukul setengah delapan. Untuk jam istirahat, W mengungkapkan kalau bus kampus berputar terus setiap harinya kecuali hari Jumat. Pada hari Jumat, bus akan berhenti beroperasi sebentar pada waktu salat Jumat dan kembali melakukan perjalanan setelahnya.

"Dari depan, ke barat, ke Teknik terus Ekonomi, FISIP, Hukum, FKIP *muter* turun ke Pasca terus FKIP gedung F terus MIPA, Pertanian, ke depan lagi," jawab W saat ditanya rute yang dilalui oleh bus kampus saat ini.

Rosma dan Azzizah kembali melontarkan jawaban yang hampir sama ketika ditanyai perihal jadwal dan rute bus kampus. Keduanya kurang mengetahui soal itu dan biasanya lebih memilih menggunakan bus kampus pada saat tidak terburu-buru

Gambar: Surakarta, Jumat 2 Juli 2021 – Bagian dalam bus kampus UNS Solo yang sepi penumpang. –Khaira Fadia Thoriq/LPM Kentingan

karena kekurangtahuan mereka itu. Namun, sejak pandemi terjadi dan kuliah daring dilaksanakan, bus kampus juga ikut terdampak dan tidak dapat beroperasi seperti sebelumnya.

"Sudah hampir dua tahun tidak boleh beroperasi, cuman Jumat minggu pertama," jawab W perihal jadwal operasional bus di masa pandemi ini.

Untuk ke depannya

"Keadaan *bis* udah baik," jawab Azzizah saat ditanya soal fasilitas dan armada bus yang digunakan. Begitu pun Rosma ketika menanggapi pertanyaan serupa.

W juga mengungkapkan jika dari kru bus menemukan kerusakan, maka mereka akan langsung melaporkannya kepada pihak rektorat bagian rumah tangga dan selanjutnya akan diproses. Oleh karena itu, hingga saat ini armada dan juga fasilitas yang ada dapat dikatakan baik dan terjaga.

Perbaikan fasilitas penunjang yaitu halte agar lebih nyaman digunakan juga dilakukan oleh pihak kampus. Dapat dibilang tidak ada halte yang kurang layak. Namun dengan fasilitas yang baik tersebut, tak dapat dipungkiri kalau pengguna bus kampus masih sedikit.

"Menurutku enggak banyak yang pakai, aku sering liat *bis*nya kosong, dan waktu aku naik pun penumpangnya enggak sampai lima orang," terang Rosma saat ditanyai pendapatnya tentang penumpang bus kampus.

Azzizah juga mengungkapkan hal serupa. "Sedikit, jarang banget ada yang naik *bis* kampus. Kurang tau itu karena belum tau ada *bis* kampus atau *gimana*."

Pernyataan-pernyataan tersebut juga didukung oleh W. Beliau mengungkapkan bahwa mahasiswa lama jarang terlihat menggunakan bus kampus. Mahasiswa cenderung lebih memilih menggunakan kendaraan pribadinya seperti sepeda motor pada saat di dalam kampus. Padahal tujuan dari adanya bus kampus sendiri adalah agar *civitas academica* mengurangi polusi udara dengan menggunakan transportasi umum. Namun, sepertinya hal ini belum sepenuhnya terwujud.

Kurangnya minat *civitas academica* khususnya mahasiwa dalam menggunakan bus kampus juga terjadi karena kurang jelasnya jadwal operasional. Mungkin jika operasionalnya lebih tepat waktu serta di setiap haltenya diberi jadwal dan rute, maka *civitas academica* juga akan lebih berminat.

"Jika penumpang bus kampus cukup banyak, maka akan berkurang pula polusi udara dan UNS dapat dikatakan cukup sukses mencerminkan sebuah green campus."

Gambar: Ayu Meliana Sari

Predikat Kampus Hijau dan Tanggung Jawabnya

Oleh: Andriana Sulistiyowati

Seiring berjalannya waktu, permasalahan sampah kian tampak di permukaan. Perlahan-lahan, manusia semakin sadar bahwa aktivitas hariannya memicu produksi sampah yang tidak sedikit jumlahnya. Sampah-sampah tersebut dihasilkan dari mana saja, tidak terkecuali instansi pendidikan.

UNS sebagai salah satu penyandang kampus hijau sudah melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Selain itu, UNS juga membuat pupuk dari hasil pemilahan sampah organik. Namun, hanya sedikit mahasiswa yang mengetahui apakah pemilahan tersebut hanya dilakukan di tempat sampah lingkungan UNS atau juga di pembuangan akhir. Sebab, yang kita ketahui, di pembuangan akhir ujung-ujung nya segala jenis sampah akan disatukan.

Adanya pemilahan sampah sebenarnya cukup efektif karena secara tidak langsung masyarakat kampus sudah membantu memilih jenis sampah yang dibutuhkan dalam pembuatan pupuk kompos. Selain itu, sampah anorganik yang dipisahkan akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi karena mempermudah dalam pengolahan daur ulang.

Menurut *UI GreenMetric,* UNS berada di peringkat ketujuh sebagai kampus hijau se-Indonesia. Tingkat ini menunjukkan bahwa sebenarnya UNS memiliki lingkungan yang bersih dan nyaman serta gedung yang hemat energi. Dengan demikian, UNS dapat disebut sebagai kampus ramah lingkungan.

Ramah lingkungan memiliki arti yang sangat luas, baik dari produksi sampah, tanaman, penggunaan energi, maupun sumber daya manusianya. Intinya, kampus ramah lingkungan harus memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitar. Dalam hal ini, UNS diuntungkan dengan memiliki lahan yang luas se hingga bisa menciptakan hutan di kampusnya. Beraneka jenis tanaman pun dapat hidup subur di lingkungan UNS.

Masalah yang selalu hangat diperbincangkan baik di lingkungan Universitas Sebelas Maret maupun

Gambar: Ayu Meliana Sari

dalam lingkup Indonesia bahkan dunia adalah tingginya konsumsi plastik. Menurut data dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sampah botol plastik di Indonesia yang terbuang ke lingkungan mencapai 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik. Setiap harinya, tanpa disadari, orang-orang menggunakan satu hingga dua botol plastik. Hal inilah yang lama-kelamaan akan mengganggu ekosistem laut dan lingkungan.

Di media sosial terdapat banyak data yang menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Sebagai generasi milenial di era *Society 5.0,* sudah sepatutnya mahasiswa mengambil peran dalam mengurangi sampah plastik. Peran tersebut tidak usah terlalu muluk-muluk, cukup dimulai dari diri sendiri. Monalisa Indah Parawansa, mahasiswa Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi, berpendapat bahwa salah satu yang dapat dilakukan oleh mahasiswa adalah memanfaatkan tumbler. Penggunaan tumbler dirasa efektif untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia.

"Penggunaan botol minum tumbler adalah salah satu cara untuk mengurangi sampah plastik dari kemasan air minum yang kita konsumsi sehari-hari selain melakukan daur ulang sampah plastik. Hal ini menjadi sangat penting karena jika kita tidak mulai untuk mengurangi penggunaan plastik, maka dalam kurun waktu 10 tahun ke depannya laut kita akan banyak diisi plastik ketimbang ikan," ujar Monalisa.

Senada dengan pernyataan Monalisa, mahasiswa Prodi Teknologi Pangan 2020, Qanita, mengatakan tumbler atau botol minuman yang bisa dipakai berulang kali mampu secara drastis menurunkan produksi sampah plastik di Indonesia. Penggunaan tumbler dalam rangka mengurangi sampah plastik akan lebih efektif dan efisien apabila diterapkan di instansi besar seperti lembaga pendidikan.

"Dengan menggunakan tumbler dalam bentuk apa pun itu, mulai yang kaca, atau bisa juga yang bahannya plastik *BPA-Free* atau *food safe*, maupun yang *stainless steel* yang bisa dipakai berkali-kali itu sangat-sangat bisa

mengurangi sampah plastik yang sekali pakai terutama botol minum," tegas Qanita.

"Setuju banget sih semisal tumbler jadi jalan alternatif di kalangan mahasiswa karena kebanyakan mahasiswa kan *hectic* ya. Selain kuliah, mereka juga ada kegiatan di dalam maupun luar kampus itu sendiri. Artinya, mahasiswa butuh minum dalam jumlah yang enggak dikit. Dengan memakai tumbler, itu sudah bisa menjaga lingkungan karena udah mengurangi sampah plastik yang susah banget membusuk. Sebagai mahasiswa, kita memang seharusnya bisa *aware* sama isu lingkungan dan tahu solusinya sesimpel membawa tumbler dimanapun," timpal Mighty Razzaq, mahasiswa Ilmu Komunikasi tingkat 2 UNS.

Penggunaan tumbler sendiri memang sudah menjadi tren di kalangan mahasiswa dan harus dijadikan kebiasaan untuk ke depannya. Memang butuh usaha lebih untuk tidak hanya berhenti pada kesadaran masyarakat terutama mahasiswa dan anak muda saja, tetapi juga untuk menggerakkan aksi para mahasiswa mengenai gerakan ramah lingkungan. Rasanya percuma saja muncul pemikiran 'aduh iya ya, banyak banget sampahnya', tetapi aksi belum ada.

Mighty berpendapat, kurangnya eksekusi dari mahasiswa merupakan akibat dari kampanye *zero waste* yang masih menggantung. Dikatakan menggantung karena tidak adanya aksi lanjutan untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan jika plastik menguasai bumi.

"Dari *campaign* yang aku lihat, cuma *dijelasin* kalau plastik enggak baik buat lingkungan. Udah, setop di situ aja, nggak ada aksi atau dampak lebih lanjut dari aktivitas tersebut. Nah, menurutku jika konsep *campaign*-nya dibuat lebih terstruktur dan ada *output* yang bisa mahasiswa atau orang-orang lakukan, itu akan menjadi sebuah gaya hidup yang bagus ke depannya." ujar Mighty.

Kampus dapat bertindak tegas terhadap *civitas academica*-nya. Sebab, pihak kampus mempunyai otoritas untuk membuat aturan tersendiri mengenai penggunaan plastik. Perlu sekali dibuatkan kebijakan wajib membawa tumbler dan memperbanyak fasilitas untuk mahasiswa mengisi ulang minumnya *(refill station)*. Secara perlahan dan seiring waktu, mahasiswa akan terbiasa mengikuti aturan yang diberikan karena itu merupakan kebutuhan mahasiswa sendiri.

Terkait permasalahan plastik ini, setiap orang harus berubah, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Sebaliknya, kebijakan pemerintah saja juga tidak cukup, harus ada gerakan dari masing-masing individu. Keduanya harus saling bersinergi. Hal ini dikarenakan jika tingkat kesadaran masyarakat terhadap masalah plastik tinggi, tetapi regulasi pengelolaan sampah tidak baik dan produksi plastik terus-menerus meningkat, semuanya akan percuma. Sama halnya apabila peraturan dibuat, tetapi tidak setiap orang melaksanakannya. Oleh karena itu, pihak yang mempunyai pengaruh lebih besar seperti korporasi dan pemerintahan harus bisa mengarahkan perubahan ini secara individu dan memulai dari hal yang sederhana, misalnya tumbler.

"Jadi, sebaiknya dari campaign ada sebuah output langsungnya, bukan cuma sekadar kata-kata,"

TikTok Life Hack Campus: Innovative and Efficient

Cara Cepat untuk Mempersingkat Alur Suatu Proses

Oleh: Michelle Eugene Zalika Mukarim

Pada masa pandemi virus Covid-19 seperti sekarang ini, TikTok merupakan platform yang banyak digunakan oleh masyarakat. Ramainya media baru ini memunculkan inovasi berupa konten yang mengandung berbagai hal. Salah satunya adalah *life hack campus* yang banyak dibutuhkan oleh mahasiswa. Lebih menariknya, pembuat konten tersebut berasal dari kalangan mahasiswa sendiri sehingga isi kontennya bisa *relate* dengan masalah modern yang dihadapi.

Life hack memiliki pengertian sebagai segala cara, jalan pintas, keterampilan, atau metode baru yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi waktu. Istilah ini sering digunakan oleh para ahli komputer yang menderita kelebihan informasi atau mereka yang memiliki rasa ingin tahu yang menyenangkan tentang cara untuk mempercepat alur kerja dengan cara selain pemrograman.

Ketika TikTok kembali viral karena pandemi, kontennya banyak memberikan hiburan dan manfaat terlepas dari pendapat orang yang menganggap aplikasi tersebut tidak jelas. Variasi konten TikTok sekarang sangat beragam, setiap pesan yang termuat di dalamnya dapat memenuhi ekspektasi dari pengguna media sosial di masa kini. Selain memuat informasi yang bermanfaat, konten di platform video pendek tersebut juga menyuguhkan hiburan yang digandrungi para penggunanya sehingga membuat TikTok meledak kembali.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Monika Sri Yuliarti menyebutkan bahwa pengguna TikTok didominasi oleh generasi Z. Umur 15–30 tahun awal merupakan pasar sasaran TikTok. Jika dilihat dari data pengguna, platform TikTok ini sangat bermanfaat. Hal itu karena orang dapat menemukan sesuatu yang ia cari, semisal tips dan trik dari konten yang ada di platform tersebut. Ada keterkaitan antara pesan yang tersedia di aplikasi TikTok dengan kelompok usia atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran konten platform tersebut.

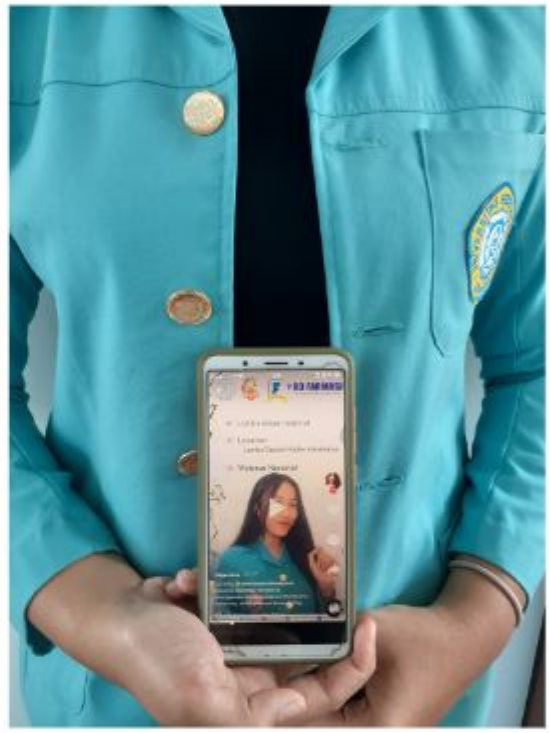

Gambar: Bagi mahasiswa, TikTok menjadi sumber informasi webinar dan perlombaan (03-08) –Riza Noermala/LPM Kentingan

Dewasa ini, teknologi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mengakibatkan banyak perubahan tips dan trik. Jika dilihat dari keadaan sekarang, dengan sekali klik orang dapat menemukan cara mempersingkat pekerjaan, tidak seperti zaman dahulu yang sangat sulit dan terbatas. Model *life hack* juga berbeda. Sebelumnya, seseorang hanya bisa menerima tips dari orang terdekatnya. Dengan kata lain, orang tersebut adalah

orang yang dipercaya dan dirasa memiliki kesamaan. Sementara sekarang, tren untuk pencarian tips dan trik ini tidak melulu harus dari orang yang dikenal, tetapi bisa dari media lain, dari platform mana saja.

"Menurut saya, ini adalah salah satu inovasi yang positif, karena ketika sebagian orang menggangap aplikasi TikTok tidak berguna, ternyata ada konten yang mengandung hal-hal positif. Jadi, kita juga tidak bisa menganggap TikTok sebagai aplikasi yag tidak berguna, walaupun sampai sekarang masih ada konten yang tidak jelas. Akan tetapi, dengan adanya konten-konten seperti *life hack* yang di- sampaikan dengan kemasan yang berbeda-beda, yang berbeda juga, begitu pula dengan bahasa, jadi kebermanfaatan sangat esensial di era sekarang ini," jelas Monika.

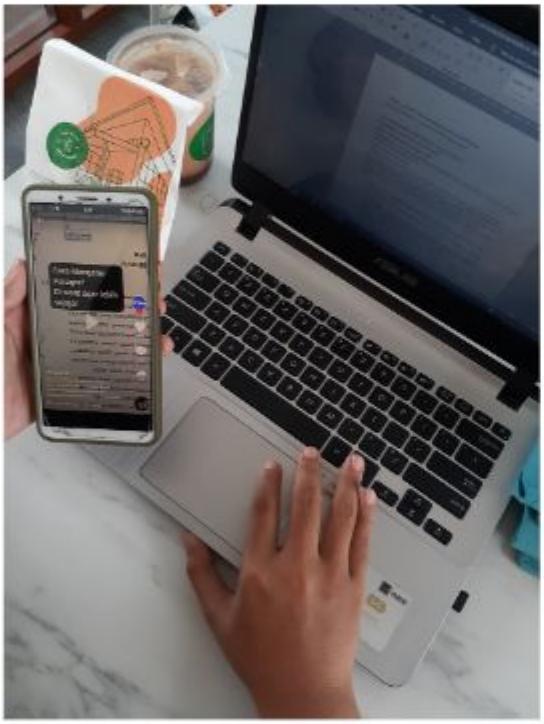

Gambar: Mahasiswa memanfaatkan TikTok sebagai acuan untuk melakukan suatu kegiatan melalui konten tutorial yang diunggah oleh kreator (03-08) –Riza Noermala/LPM Kentingan

Menyaring konten dalam TikTok sangat diperlukan dan ini menjadi salah satu kelemahan media sosial. Ketika mendapatkan informasi dari media sosial, penikmat media sosial membutuhkan keterampilan untuk memilah dan memilih mana konten yang benar, sesuai, serta dapat dipertanggungjawabkan dan mana konten yang tidak teruji keabsahannya. Konten yang dibuat dan dipublikasikan di media sosial itu tidak memiliki *gate keeper* atau penyaring. Hal ini berbeda dengan informasi yang disampaikan di media massa konvensional seperti televisi, radio, dan surat kabar. Di media tersebut, sebelum informasi muncul banyak alur yang harus diikuti. Sementara informasi di media baru, yang dipublikasikan dengan keterlibatan internet seperti TikTok, pengguna sebagai pemilik akun yang akan menulis/membuat *life hack* merancang konten tersebut sendiri sehingga hampir tidak ada *gate keeper* di sana.

Ketika seseorang mengonsumsi informasi dari media sosial, ia harus lebih bijak, seperti yang diistilahkan sebagai literasi digital, yaitu kecakapan seseorang dalam mengonsumsi atau menggunakan media sosial. Di luar dari banyaknya konten-konten menarik yang ada di TikTok, entah itu tentang materi perkuliahan atau informasi pengetahuan tetap harus dipastikan bahwa informasi tersebut valid karena tidak ada proses *gate keeper* pada informasi di media sosial tersebut.

Ada beberapa cara menjadi *content creator* yang baik, entah dari segi penyampaian maupun informasi yang diangkat dalam konten. Pertama, pesan yang ada dalam konten tidak boleh terlalu banyak karena ada keterbatasan waktu, semisal satu poin saja yang dipakai. Kemudian yang kedua adalah mengemas pesan tersebut sesuai dengan kelompok yang menjadi pasar sasaran. Ketiga, selipkan candaan yang sesuai dengan pasar sasaran dan jangan sampai menyinggung kelompok tertentu. Keempat, variasikan berbagai aspek visual, seperti model video bergerak dengan huruf yang lucu. Cara terakhir adalah musik yang dipakai dalam konten bisa musik populer, tetapi harus tetap disesuaikan dengan pesan yang dibawa.

"Life hack TikTok sangat bermanfaat sekali. Banyak orang baru mengetahui tips-tips perkuliahan juga dari TikTok sehingga sangat membantu penugasan dalam perkuliahan,"

-Monika Sri Yuliarti.

Ilustrasi: Muhammad Ilham Al Basyari

Kampus Inklusi: Sudahkah Ramah bagi Mahasiswa Difabel?

Oleh: M. Wildan Fathurrohman

Sejak pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah akibat adanya pandemi Covid-19, bidang pendidikan juga mau tidak mau harus beradaptasi dari sistem luring ke daring. Semua jenjang mulai dari tingkat sekolah dasar hingga universitas merasakan perubahan signifikan dalam kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, sistem pembelajaran secara daring tidak sepenuhnya tanpa hambatan bahkan efektivitasnya pun dinilai masih kurang. Pasalnya, banyak mahasiswa yang mengeluhkan perihal beban tugas, kendala jaringan dan kuota, hingga penyampaian materi perkuliahan. Di sisi lain, kendala dalam melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring juga dialami oleh mahasiswa penyandang disabilitas.

Universitas Sebelas Maret (UNS) telah dinobatkan sebagai salah satu kampus inklusi di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan diterimanya *Inclusive Award* dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada 2012. Tentu ini menunjukkan bahwa dari berbagai aspek UNS siap menerima kehadiran mahasiswa difabel. Akan tetapi, faktanya masih ada kendala yang menghambat mahasiswa penyandang disabilitas dalam menjalani perkuliahan terutama ketika daring. Salah satu kendala berarti yang dialami yakni perihal komunikasi.

Tipa (21), mahasiswi penyandang disabilitas Tuli, mengaku bahwa komunikasi masih menjadi hambatan dalam mengikuti perkuliahan secara daring. "Apalagi kalau ada tugas kelompok, teman-teman lebih sering membahas via Google Meet. Nah, itu yang bikin aku *nggak* paham. Di sisi lain, *nggak* ikut juga *nggak* enak. Mau minta *ngetikin* pun sungkan karena mereka *udah* mikir dan bahas, masa masih *ngetikin* lagi buat aku," ungkapnya.

Sementara itu, Arianti (25) sebagai mahasiswi penyandang disabilitas netra juga mengalami kendala yang sama dalam hal komunikasi. "Kalau daring begini cari teman buat kelompokan agak susah terutama koordinasinya," tuturnya. Sejauh ini Arianti lebih merasa nyaman menjalani kuliah secara luring karena untuk koordinasi lebih enak dan cepat. Selain itu, ia juga tidak begitu bergantung pada sinyal dan perbedaan waktu antara WIB dan WITA.

Berbanding terbalik dengan Arianti, Tipa merasa nyaman menjalani kuli-

ah secara daring. Hal itu dikarenakan *file* materi perkuliahan lebih mudah didapat. "Ketika luring kan kadang mesti minta dulu ya. Terus kalau daring ada aja teman yang bersedia *ngetikin* apa yang disampaikan oleh dosen," ujarnya. Sebenarnya baik luring maupun daring dia membutuhkan pelayanan khusus semacam *volunteer* yang membantu mengetik apa yang disampaikan oleh dosen. "Selama ini metode perkuliahannya ceramah sehingga sebagian besar yang disampaikan itu *ngeblur* di telingaku meskipun *udah* coba memperhatikan. Jadi, jatuhnya sepanjang kuliah hanya menahan kantuk," imbuhnya.

Berangkat dari apa yang terjadi di lapangan, seharusnya pihak UNS menyiapkan dengan baik fasilitas penunjang bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Terlepas dari sistem perkuliahan luring dan daring, sudah 9 tahun UNS menyandang gelar kampus inklusi sehingga mestinya terus berbenah agar pelayanannya semakin baik pula. Tentu ini tidak hanya berlaku pada program studi atau fakultas yang terdapat mahasiswa penyandang disabilitas saja. Akan tetapi, prodi lain juga harus bersiap karena UNS sudah membuka ruang yang sama dalam seleksi masuk perguruan tinggi.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Guru Besar Manajemen Pendidikan Inklusif, Munawir Yusuf, dalam *uns.ac.id*. "Perguruan tinggi wajib memberi ruang yang sama bagi penyandang disabilitas untuk dapat mengikuti seleksi masuk ke perguruan tinggi dan perguruan tinggi wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi mahasiswa disabilitas yang diterima." Sudah jelas bahwa UNS menjamin fasilitas atau pelayanan serta tidak ada diskriminasi bagi mereka apabila nanti diterima sebagai mahasiswa.

Apabila meninjau kembali dari segi pembelajaran, Tipa menyayangkan fasilitas penunjang tulis yang disediakan UNS hanya terbatas pada Juru Bahasa Isyarat (JBI) saja padahal ada beberapa anak yang nyaman memakai lisan dan tulisan. "Selain itu, akan lebih enak kalau ada orang yang bisa mendampingi mahasiswa tuli khususnya yang *hard of hearing*." Kemudian edukasi kepada seluruh staf di lingkungan UNS terkait mahasiswa penyandang disabilitas juga sangat penting. "Terkadang juga *ngeselin* kalau kita *udah* tanya baik-baik, tetapi jawaban dari staf terkesan jutek dan tidak membantu," pungkasnya.

Senada dengan Tipa, Arianti berharap dosen dan teman-temannya dapat kooperatif kepada mahasiswa penyandang disabilitas. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi yang baik agar semua sama-sama tahu dan dapat mencari solusi apabila terdapat kendala. "Ini dapat diambil contoh ketika sedang kuliah daring memakai Spada. Nah, dosen juga harus memastikan kalau aplikasi yang digunakan itu mudah diakses menggunakan *screen reader* oleh penyandang disabilitas netra, seperti aku."

Kesulitan dalam mengikuti perkuliahan daring juga dirasakan oleh Iqbal (21), mahasiswa penyandang disabilitas tuli, agak susah memahami materi kuliah melalui *video conference*. "Ketika semester satu masih lumayan, tetapi semester ini ada nilai E-nya. Kemungkinan ada dosen yang belum tahu kalau saya mahasiswa difabel," ucapnya. Oleh karena itu, Iqbal mengaku butuh bantuan *volunteer* untuk mendampingi selama perkuliahan daring.

Di sisi lain, UNS sebagai kampus yang memiliki prodi Pendidikan Luar Biasa (PLB) dinilai masih kurang peka terhadap fasilitas fisik penunjang pembelajaran. Pasalnya, sejauh ini tidak ada lift yang bisa digunakan sebagai akses padahal seluruh ruang kelas prodi PLB berada di lantai dua.

Iqbal berharap mahasiswa penyandang disabilitas bisa mendapat kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Selain itu, disediakan juga fasilitas penunjang perkuliahan bagi mahasiswa difabel sesuai dengan ketunaan masing-masing. Adapun hal yang terpenting adalah penyesuaian beban tugas atau materi sesuai dengan kemampuan mahasiswa difabel. Maka dari itu, kebijakan-kebijakan yang ramah dan tidak diskriminatif terhadap penyandang disabilitas sangat diperlukan.

Mungkin sampai saat ini belum terasa perlu atau penting karena perkuliahan masih daring. Namun, apabila nanti perkuliahan sudah luring dan ada mahasiswa disabilitas fisik (tunadaksa) terlebih di kaki, masa harus terus naik turun tangga untuk bisa mengikuti perkuliahan?

Gambar: Dokumentasi Narasumber

Butet Manurung: Pendidikan untuk Siapa?

Oleh: Rizky Nur Fadilah

Sekolah yang hebat tidak tergantung pada gedung yang megah dan sistem berteknologi tinggi. Roh dari pendidikan terletak pada setiap gurunya. Gurulah yang berdiri di depan kelas –untuk mendidik dan menginspirasi anak-anak serta menjadi teladan bagi anak didik mereka. Butet menyinarkan cahayanya di kedalaman rimba raya Indonesia.

–Anies Baswedan–

Saur Marlina Manurung, lebih dikenal dengan panggilan Butet Manurung, adalah seorang pahlawan pendidikan yang lahir di Jakarta pada tanggal 21 Februari 1972. Kepedulian beliau dalam hal pendidikan bagi masyarakat rimba bermula dari kegemarannya menonton film petualangan seperti "Indiana Jones". Pengalaman menapaki pedalaman di Bukit Duabelas membawanya pada suatu fase keprihatinan terhadap masyarakat rimba yang menetap di sana. Kehidupan mereka mulai terusik oleh pihak-pihak yang ingin menguasai hutan sebagai lahan bisnis korporasi. Dari sinilah Butet Manurung bersama kawannya merasa bahwa masyarakat rimba perlu mendapatkan pendidikan layaknya orang luar (kota) sebagai upaya melindungi diri dari penindasan.

Perjalanan beliau menjadi relawan WARSI, LSM yang bergerak pada isu konservasi, menunjukkan bahwa masyarakat rimba sangat membutuhkan seorang pendidik, seorang fasilitator pendidikan, sehingga mereka tidak bisa didampingi oleh orang sembarangan. Memahami kehidupan masyarakat rimba dan mendapatkan kepercayaan orang-orang

Gambar: Dokumentasi Narasumber

pedalaman adalah tantangan terbesar dalam hidupnya. Butuh waktu yang tidak sebentar baginya untuk memahami bahwa masyarakat rimba tidak seperti yang diimajinasikan orang luar. Menurutnya, masyarakat rimba paham tentang cara mengobati gigitan ular kobra karena memang di sana banyak ular dan mereka belajar tentang itu semua. Sama halnya dengan orang kota yang dapat menggunakan aplikasi Google Maps saat sedang tersesat di suatu tempat. Di antara keduanya tidak ada yang pintar, semua sedang dalam proses belajar.

Suku anak dalam termasuk suku yang tertutup dari dunia luar. Mereka menolak pendidikan karena dianggap bukan budayanya. Butet Manurung berusaha menjadi "Ibu Guru" yang dapat diterima di sana, tidak memberikan konsep sekolah sebagaimana orang memahami sekolah itu sendiri. Di sinilah peran Butet, memberikan pengajaran tanpa mengajar, berbaur dengan kehidupan mereka selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Baginya, belajar tidak harus dalam suatu ruangan, ada meja, papan tulis, dan guru yang mengajar di depan mereka. Roh dari pendidikan yang diberikan oleh Butet terletak pada ilmu yang disampaikan kepada mereka.

Butet dituntut kreatif dan inovatif dalam menggunakan segala cara untuk menarik minat mereka. Misalnya, mengajari mereka bersepeda, mengusahakan pengobatan hingga memberikan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung secara sembunyi-sembunyi. Butuh usaha-usaha yang bahkan di luar nalar agar mereka mau diberikan sedikit pemahaman baru. "Kak Butet adalah orang yang berkemauan keras. Jika sudah punya kemauan, ia akan memperjuangkan kemauannya itu sampai titik darah penghabisan. Namun dibalik itu semua ia juga merupakan orang yang penuh empati, sangat peduli khususnya kepada orang-orang terdekatnya dan tidak segan memberikan bantuan," kata Indit, salah satu CEO Sokola Rimba.

Butet mendirikan sarana sekolah sederhana yang dibangun dari batang kayu dan dedaunan. Sekolah yang dibangunnya tidak permanen karena disesuaikan dengan kehidupan orang rimba yang sifatnya nomaden. Butet tidak hanya mengajarkan orang rimba mengenai membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga keterampilan hidup, pengetahuan dunia luar dan juga pengenalan organisasi. Orang rimba hidup di alam secara bebas. Mereka memanfaatkan seluruh potensi alam untuk menyokong kebutuhan hidupnya. Ketidakmampuan orang rimba untuk membaca dan menulis dapat sangat mengancam keberadaannya.

Guru tidak hanya sebatas guru, tetapi antara guru dan murid harus menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Sokola Rimba yang didirikan oleh Butet dan beberapa temannya semasa di WARSI, saat itu merupakan satu-satunya sekolah yang mencitrakan pendidikan *ala* orang rimba. Tidak hanya sebatas pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi mencoba untuk masuk lebih dalam, yaitu menyadarkan orang rimba akan potensi dan eksistensi mereka sebagai orang rimba yang menjaga hutan. Ia menyadarkan kita akan pen-

Gambar: Dokumentasi Narasumber

tingnya pendidikan bagi masa depan seseorang. Banyak orang rimba yang belum mendapat akses pendidikan layak, sampai-sampai mereka menganggap pendidikan adalah hal yang dapat membawa bencana.

Sokola Rimba berupaya memberikan kesempatan belajar bagi komunitas adat dan kelompok marginal lain di wilayah terpencil Indonesia yang tidak terjangkau oleh sekolah formal. Visinya adalah "Sekolah untuk Kehidupan," sedangkan misinya adalah untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi tantangan dari dunia modern yang selalu mendesak. Pendekatan yang digunakan oleh Sokola adalah pendekatan etnografi. Pendekatan ini banyak digunakan oleh antropolog dan sangat cocok untuk masyarakat adat dengan mengonstruksikan pemahaman mengenai adat rimba. Misalnya, kebahagiaan masyarakat rimba adalah dengan terjaganya hutan, cantik bagi mereka adalah yang bertubuh pendek dan panjang rambutnya, dan hebat bagi mereka adalah yang dapat memanjat pohon madu, pintar berburu serta pintar berdiplomasi dengan masyarakat luar.

Di pedalaman Bukit Duabelas inilah Butet menemukan cita-cita dalam hidupnya, yaitu memberikan pengajaran baca, tulis, dan menghitung kepada orang rimba. Butet terus berusaha agar makin banyak yang tertarik dengan pengajarannya. Hal ini tentunya agar mereka terlepas dari buta aksara yang akan terus-menerus dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, tentu juga untuk menegaskan bahwa setiap manusia berhak memperoleh keadilan dan akses yang sama dalam memperoleh pendidikan. Di luar sana banyak orang pintar, tetapi tidak berakal.

Jika dibandingkan dengan pendidikan formal yang acuannya adalah persaingan global, maka menurutnya pendidikan adalah monopoli, siapa yang paling sering dan paling lama dalam bermain ia akan menang. "Kalau melihat pendidikan di masyarakat adat, tentu paradigmanya berbeda. Pendidikan yang diberikan bagi mereka adalah bekal pengetahuan dan keterampilan yang digunakan untuk menjalani hidup, bukan untuk kompetisi global," tegasnya. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berguna bagi sekitarnya. Beliau juga menyebutkan, apa artinya banyak sekolah unggul di suatu wilayah, tetapi sungai di sekitarnya penuh dengan sampah. Mirisnya, masyarakat sama sekali tidak peduli, padahal sejatinya sekolah adalah ekosistem yang harus terintegrasi dengan sekitarnya.

"Jadi, ketika ditanya pendidikan untuk siapa, kalau dalam konteksnya adalah pendidikan formal, maka pendidikan itu untuk mengatasi tantangan global yang lebih kepada alat untuk memberdayakan diri. Pendidikan seharusnya untuk siapa pun yang bisa saling bertukar pikiran," jelasnya. Di akhir, beliau juga menambahkan bahwa pendidikan yang baik seharusnya membantu setiap orang mengenal dirinya lebih baik, membantu diri sendiri dalam mengatasi permasalahan yang ada di sekitar. Dengan kata lain, pendidikan menjadi alat pemberdayaan diri bukan untuk memperdaya orang lain.

Gambar: Dokumentasi Pentas

Alun Lincah Kidang Bocah

Oleh: Reva Nugraha

Kidang talun panganane jagung lawan lembayung. Sobone turut gunung among angu padi banyu. Wulu kuning awak langsing yen mlaku milang-miling.

Dua ekor kijang dengan atraktif mulai memunculkan dirinya. Seperti menikmati suasana hari ini, mereka berhadapan sambil sesekali menggoda satu sama lain. Melompat dari satu sudut ke sudut berikutnya, sesekali menimbul–tenggelamkan kepalanya seolah bermain petak umpet. Hingga ketika matahari mulai meninggi dan dua ekor kijang emas tersebut sampai di tempat yang jauh dari asalnya, kawanan kijang emas yang muncul semakin ramai seolah paham bahwa 'teman jauh' sedang berkunjung ke teritorial mereka. Meskipun tampaknya sepasang kijang yang berasal dari nun jauh itu masih belum menyadari ada kawanan lain yang ikut meramaikan permainan mereka.

Gerakan luwes nan energik yang memukau mata itu ditarikan dengan apik oleh lebih dari 400 penari dari 54 kelurahan di Kota Surakarta. Bukan tanpa alasan mereka menari dalam jumlah massal. Para

penari cilik tersebut unjuk gigi dalam festival Solo Menari Virtual 2021 dalam rangka peringatan Hari Tari Dunia. Mengambil waktu pada Kamis, 29 April 2021, ini pertama kalinya Solo Menari diadakan secara virtual mengingat kondisi pandemi Covid-19 masih belum terkendali. Berbeda dengan acara tahun-tahun sebelumnya yang berjudul "Solo Menari 24 Jam" dan berpusat di Stadion Sriwedari, tahun ini setiap penari tampil dari kelurahan masing-masing secara serempak dengan panggung utama berlokasi di Ndalem Joyokusuman dengan penonton langsung adalah tamu kehormatan.

Kawanan kijang terus berlari kesana-kemari seakan tidak ada yang mampu mengusik kebebasan mereka. Penabuh dan pesinden masuk di tengah-tengah segmen melagukan harmoni seperti suara alam dan para kijang bak menyambut alam yang sedang berlagu dengan bergerak makin dramatis. Senyum cerah terpatri di bibir para penari bersetelan emas yang menghantarkan pula keceriaan bagi audiens. Tanpa sadar para audiens menyambut senyum polos penari-penari cilik dengan tepuk tangan riuh tanda apresiasi terhadap penghargaan budaya yang sejak dini telah dilakukan oleh muda-mudi bertalenta itu. Lompatan-lompatan yang dibarengi gerakan kepala sukses memvisualisasikan bagaimana kijang itu sendiri hidup tanpa banyak berpikir dan menanggung beban seperti manusia dewasa. Sebuah kebebasan yang digambarkan secara gamblang melalui gerak tubuh. Kelompok besar kijang itu pun berpisah lagi menjadi beberapa kelompok kecil yang menampilkan gerakan berbeda.

Dikutip dari *wikipedia,* Tari Kidang merupakan tarian asli dari Provinsi Jawa Barat yang merupakan tarian kreasi baru atau kontemporer. Sebagai tarian yang berjenis fabel, ada beberapa hal yang bisa dimaknai dari pementasan Tari Kidang ini, seperti keceriaan sekawanan kijang yang sedang berlari, melompat, bercengkerama, dan karakter kuat dari hewan kijang yang dimunculkan dalam tarian ini. Makna paling dasar dari pementasan Tari Kidang ini sebenarnya adalah kebiasaan dari hewan kijang tentang cara mereka bertahan hidup di hutan, membentuk kelompok, dan sifat-sifat natural kijang yang lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dari gerakan yang didominasi lompatan (gerak kaki), angkat tangan ke depan, dan gerak kepala. Dalam versi yang diperankan oleh bocah-bocah dalam festival Solo Menari Virtual 2021 ini, kreator atau pencipta tarian adalah Untung Mulyono dari Sanggar Kembang Sore.

Berkali-kali, kawanan kijang bergerak menjauh–mendekat mengikuti naluri hewani mereka, di mana sejauh apapun mereka berburu mencari makan, mereka akan tetap kembali pada kawanannya. Suara alam perlahan memelan bersamaan dengan para kijang yang sudah tidak seenergik saat mereka baru keluar di pagi hari. Hanya gerakan-gerakan kecil dan halus yang tergambar dari gestur para penari. Sang pimpinan *pack* muncul bersama pengikut-pengikutnya diikuti suara alam yang kembali meninggi, seolah ikut memberi penghormatan terhadap raja kijang yang sedang menerima sejenis persembahan dan penghormatan dari anak buahnya. Seperti ilusi matahari yang perlahan-lahan tergelincir menghilang ditelan laut dari seberang, kawanan kijang itu kembali ke peraduannya setelah mewarnai kehidupan hutan dengan sosok-sosok mereka. Selamat malam.

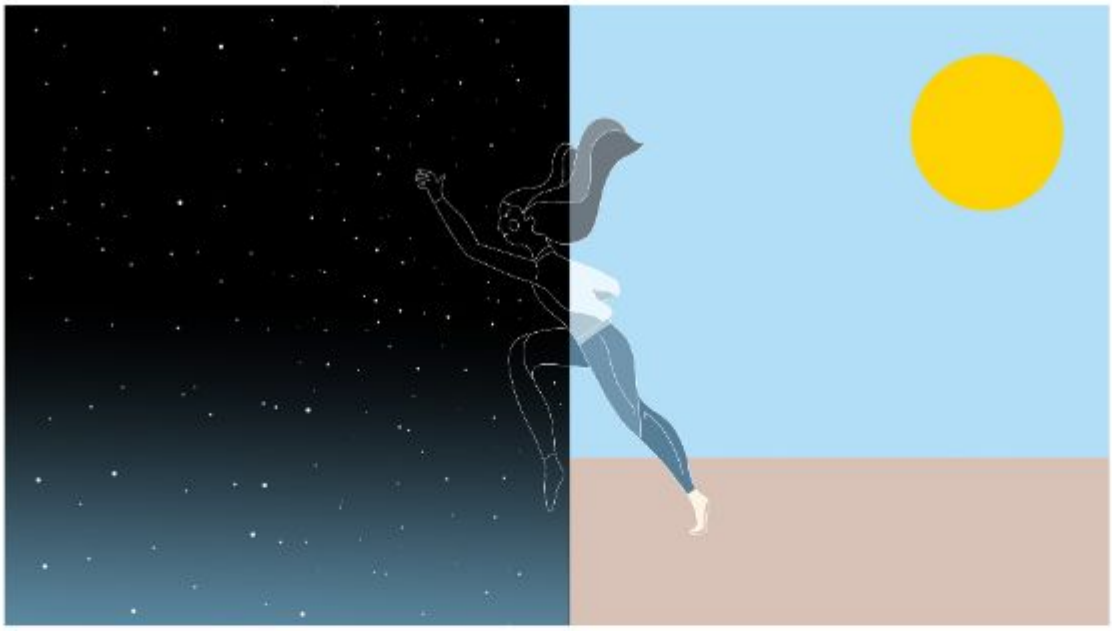

Ilustrasi: Rudiyaningsih

DUALISME

Oleh: Muhibah Syifa Awalia Rosasi

Napas yang pendek, untuk hidup yang panjang
Rasa yang pekat, untuk raga yang kian jelang
Jarak yang dekat, untuk realita yang merangkak jauh
Asa yang tinggi, untuk nyata yang amat rendah
Langkah yang pasti, untuk jalan yang mulai kabur

Mau bertaruh sejauh mana kepada fana?
Ingin mengundi nasib dengan apa lagi hari ini?
Makin dalam mengayunkan kaki,
sepertinya banyak kelam yang ditemui

Mereka akan meninggalkan ruam-ruam,
sebagai tanda sudah menjejaki
Tiada pemenang,
tiada sang kalah
Dualisme akan tetap lahir, sampai lakonmu berhenti

Ilustrasi: Hafiz Norman

Academia Pragmatismus

Oleh: Jasmine Putri Lintang Sagara Dewi

"Selamat datang di rapat pleno untuk partisipan yang baru saja hadir."

Suara Bu Yanti, rektor universitas negeri favorit yang kali ini menjadi moderator rapat pleno, menyambut Profesor Hasan yang baru saja memasuki *room* Zoom Cloud Meeting.

"Seperti yang sudah diinfokan sebelumnya, kita akan membahas mengenai pergantian Ketua Grup Para Rektor yang rutin diganti tiap empat tahun sekali. Kita semua sepakat bahwa setiap ketua yang terpilih adalah anggota grup yang memiliki pencapaian universitas yang paling membanggakan. Jadi, untuk para anggota, silakan bersiap-siap untuk menyebutkan nama, universitas yang dipimpin, serta hal paling membanggakan yang diraih universitas akhir-akhir ini. Untuk menghemat waktu, mari kita mulai dari Pak Yatno. Silakan, Pak..."

Pak Yatno mendeham sebelum membuka mulutnya untuk berbicara. "Ehm... baik. Nama saya Yatno dari Institut ITD. Kemarin, institut saya memenangkan medali emas dalam *International Robotic Competition* di Beijing, Cina."

Beberapa partisipan terlihat bertepuk tangan dari jendela Zoom masing-masing, tak terkecuali Profesor Hasan. Bila dilihat, hanya Bu Ade saja yang tak bertepuk tangan. Profesor Hasan mengangkat bahu dengan maklum. Bu Ade dan Pak Yatno memang dari dulu selalu bersaing atas pencapaian universitas masing-masing.

Saat tepuk tangan mulai mereda, Bu Yanti menyalakan *mic* kembali. "Baik, untuk selanjutnya, silakan Bu Ade."

"Halo, Bapak dan Ibu sekalian! Saya Bu Ade dari Universitas UBM. Universitas saya kemarin baru saja mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden karena bantuan kami terhadap Covid-19. Kami menyumbangkan alat yang lebih cepat, lebih murah, dan pastinya lebih berkualitas untuk mendeteksi adanya virus Corona kepada masyarakat Indonesia," rentet Bu Ade dalam

satu tarikan napas. Sontak, semua partisipan bertepuk tangan heboh mendengar pernyataan Bu Ade.

"Selamat ya, Bu Ade!" gigi palsu Pak Yatno tersibak saat beliau tersenyum setengah hati, membuat Profesor Hasan bertanya-tanya apakah beliau agak sedikit dongkol mengingat universitas Bu Ade adalah saingan terberatnya. Walau begitu, Bu Ade tetap saja cengar-cengir di jendela video Zoom, merasa bodo amat dengan cengiran setengah hati Pak Yatno yang jelas sekali terlihat iri.

"Baiklah, selanjutnya, silakan Bu Amel."

"Institut saya kemarin baru saja mendirikan gedung baru di daerah Wonosobo. Saya berharap, gedung itu—"

Profesor Hasan mendesah bingung. Entah mengapa, rasa grogi merayap masuk ke dalam hatinya. Melihat rektor lain memberikan banyak sumbangsih kepada pendidikan Indonesia membuat dirinya merasa kerdil. Serta-merta, beliau melihat plakat keemasan predikat PTN-BH yang diraih universitasnya beberapa minggu lalu. Beliau hampir saja tersenyum, sebelum akhirnya sebuah masalah penting mencuat kembali dari ingatannya.

Ini dia masalahnya: Profesor Hasan tidak pernah tahu harus berbuat apa saat universitasnya mendapat predikat PTN-BH. Setiap hari dalam masa jabatannya, yang Profesor Hasan pikirkan adalah membuat universitasnya bebas masalah. Baginya, kesuksesan universitas hanya terletak saat kegiatan belajar mengajar bisa terlaksana dengan lancar. Tak pernah dalam mimpi terliarnya ia membayangkan universitasnya meraih predikat PTN-BH secepat ini.

Tentu saja, awalnya Profesor Hasan girang saat universitasnya menjadi PTN-BH, sebelum akhirnya ia tersadar. PTN-BH artinya semakin banyak kebebasan, dan semakin banyak kebebasan artinya semakin banyak tanggung jawab. Dengan tanggung jawab sebesar ini, bukankah gawat bila ia bahkan tidak tahu harus berbuat apa?

Maka ketika Pak Kamil, rektor yang juga koleganya dari institut sebelah, menawarkan Profesor Hasan untuk masuk ke Grup Para Rektor, Profesor Hasan langsung mengiyakan. Siapa tahu dengan masuk ke Grup Para Rektor, Profesor Hasan dapat menemukan titik terang dari kebuntuan yang sudah menghantuinya beberapa hari belakangan ini.

"Profesor Hasan?" Bu Yanti mendadak *on mic*. "Sepertinya Anda belum mendapat giliran, ya? Boleh Anda memperkenalkan diri dan menyebutkan hal membanggakan apa yang diraih kampus Anda akhir-akhir ini?"

"Ah, iya, baik," Profesor Hasan sedikit tergeragap mendengar teguran Bu Yanti. Dilihatnya lamat-lamat setiap jendela Zoom yang berisi wajah-wajah para rektor se-Indonesia dengan tatapan ragu. Perasaan minder itu masih bercokol dalam benaknya. Walau begitu, Profesor Hasan menghela napas, membuka mulut untuk bersiap bicara.

"Baik, perkenalkan, saya Profesor Hasan dari Universitas UDS. Hal yang membanggakan dari universitas saya akhir-akhir ini adalah universitas saya baru saja diangkat menjadi universitas PTN-BH. Walau begitu, saya rasa ini bukan sebuah hal yang membanggakan, melainkan sebuah tantangan bagi saya untuk ke depannya. Jadi, mohon bantuannya bapak dan ibu sekalian. Terima kasih," tandas Profesor Hasan dalam sekali napas, menghabiskan sisa-sisa grogi yang bercokol dalam hatinya. Beliau baru saja ingin mendesah lega, sebelum ia menyadari ada sesuatu yang salah karena semua orang terlihat melongo dari jendela Zoom masing-masing. Bahkan Bu Ade yang biasanya cerewet, kini terdiam seribu bahasa. Pak Yatno tersenyum lebar.

"Kita punya pemenangnya kali ini! Profesor Hasan adalah Ketua Grup Para Rektor periode ini!" Pak Yatno berseru kepada seluruh partisipan Zoom Cloud Meeting. Semua partisipan bertepuk tangan meriah gegap gempita dari seberang sana. Profesor Hasan mengernyitkan dahi.

"Maaf, Pak? Tapi saya belum memberikan sumbangsih apa pun kepada pendidikan Indonesia sebesar Bapak dan Ibu sekalian. PTN-BH bukan patokan ukuran universitas saya bagus. Ketimbang saya, mungkin Bu Ade lebih cocok? Menyumbangkan penelitian untuk Covid-19 merupakan hal yang amat bermanfaat!"

Sontak, suara tawa—entah itu putus-putus akibat sinyal jelek, ataupun tawa membahana yang jernih karena sinyal bagus—bergemuruh lewat *speaker* laptop Profesor Hasan. Bahkan Pak Yatno dan Bu Ade tertawa lepas.

"Profesor Hasan, sepertinya anda salah kira," Bu Ade masih tertawa kecil di akhir kalimat. Tangannya mengusap ujung mata yang mengeluarkan air saking kerasnya tertawa. "Untuk apa kita membandingkan sumbangsih kita terhadap masyarakat? Itu tidak penting! Yang penting adalah apa yang kita dapatkan dari masyarakat!"

"Tapi, saya kira..." Profesor Hasan tergeragap.

"Jangan naif, Profesor," Bu Ade mengedikkan bahu. "Semua hal yang kita lakukan selama ini adalah demi apa yang akan kita dapatkan dari masyarakat nantinya. Uang, pamor, gengsi, segalanya! Dengan pencapaian-pencapaian besar, kita bisa mendapatkan banyak mahasiswa, dan akhirnya uang bisa mengalir lancar ke universitas! Pemasukan kita bisa bertambah lebih banyak ketimbang tahun lalu kalau kita menggunakan strategi ini. Anda, sebagai universitas penerima predikat PTN-BH, mempunyai keleluasaan untuk mengutak-atik bayaran para mahasiswa. Anda bisa menggaet banyak mahasiswa dan menghasilkan cukup banyak uang untuk diri Anda sendiri. Itu sebabnya Anda menang. Mimpi semua orang di grup ini sudah ada di tangan Anda."

"Tapi—"

"Baiklah, berhubung waktu sudah habis, pertemuan kali ini kita akhiri dulu," suara Bu Yanti memotong semua hal yang baru saja ingin terlontar dari mulut Profesor Hasan. "Selamat untuk Profesor Hasan yang telah menjadi ketua periode ini, pertemuan selanjutnya akan didiskusikan lewat grup, selamat—"

Profesor Hasan menutup laptop dengan paksa. Dilihatnya plakat emas PTN-BH yang menggantung di meja kerjanya, sebutir debu berputar-putar dan jatuh turun di bingkainya yang keemasan. Kata-kata 'ketua grup rektor' lamat-lamat hilang terseret arus kesadarannya. Masih banyak yang harus ia raih demi menyukseskan pendidikan di Indonesia. Sebuah perjalanan menanti di depannya dan plakat emas ini hanya awalnya. Profesor Hasan beranjak duduk dari kursinya. Ada banyak hal yang harus ia lakukan sekarang.

The Stranger: Orang Asing di Dunia Sendiri

Oleh: Afika Permata Ilma

Judul Buku: The Stranger

Penulis: Albert Camus

Alih Bahasa: Marina Pakaya

Penerbit: Immortal Publishing

Tahun Terbit: 2020 (Cetakan II)

Banyak Halaman: 283 halaman

Satu hal yang kita setujui bersama adalah bahwa setiap manusia itu unik. Kompleksitas dan diversitas kepribadian manusia di bumi ini merupakan hal yang tidak dapat disangkal. Sebab, setiap manusia memiliki kepribadian, cara hidup, dan preferensinya masing-masing untuk mendefinisikan diri. Di antara sekian miliar manusia di dunia, di antara sekian miliar karakter yang saling berinteraksi dan bersinggungan, sejauh mana perbedaan itu dapat diterima?

Masyarakat secara umum memiliki aturan-aturan atau norma-norma yang menjadi tolok ukur dalam berinteraksi dengan sesamanya. Aturan atau norma tersebut pada dasarnya merupakan kondisi ideal yang ingin selalu dicapai dalam menjalani hidup berdampingan tanpa adanya konflik. Namun, tentunya pelanggaran-pelanggaran masih dapat terjadi.

The Stranger memperkenalkan kita kepada *Monsieur* Mersault: seseorang yang baru menyadari bahwa ternyata dunia yang ditempatinya selama ini merupakan tempat yang asing. Dalam buku ini kita akan menilik kisah *Monsieur* Mersault serta bagaimana ia menjalani hari-hari 'normalnya'. Setidaknya, hingga sebelum ia membunuh seseorang dan harus memasuki pengadilan untuk menerima hukuman.

Monsieur Mersault merasa selama ini ia menjalani kehidupannya di Aljazair dengan biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Ia memang bukan seseorang yang selalu menyambut pagi dengan sukacita atau seseorang yang dapat membuat orang lain nyaman di pertemuan pertama. Namun, setidaknya ia merasa bahwa ia sama seperti kebanyakan orang. *Monsieur* Mersault juga tidak termasuk ke dalam kelompok orang yang merasakan kehidupan sepenuhnya dengan mengambil pekerjaan yang sesuai dengan *passion*. Pun sebenarnya *Monsieur* Mersault tidak yakin apakah ia memiliki apa yang disebut oleh orang-orang sebagai *passion*. Ia hanya menjalani pekerjaannya dengan biasa. Ia pergi bekerja dan lebih suka menunggu waktu kembali ke flatnya. Ia hanya manusia yang sama seperti manusia pada umumnya. Setidaknya begitulah yang diyakini oleh *Monsieur* Mersault.

Seiring berjalannya penceritaan dalam buku ini, akan semakin tergambarkan seberapa kosong karakter *Monsieur* Mersault yang terasa tidak memiliki ambisi maupun pegangan dalam hidupnya. Bagian pertama dibuka dengan sebuah berita kematian ibu dari *Monsieur* Mersault yang kemudian mengharuskannya untuk menghadiri pemakaman. Sebenarnya, *Monsieur* Mersault sendiri tidak dapat mengingat berapa usia ibu ketika meninggal. Pun ia juga tidak merasa bahwa kematian ibunya tersebut merupakan hal yang besar atau membawa perubahan yang berarti dalam hidupnya. Kehidupan *Monsieur* Mersault tetap berlanjut dan hari-hari berlalu tanpa ada perasaan kehilangan, mengingat ibunya pun sudah lama tinggal di panti jompo yang jauh di Moreno tanpa pernah saling berkomunikasi. Ia bahkan tidak menangis sedikit pun dan tetap dapat menghabiskan waktu dengan kekasihnya, Marie, sepulangnya ke Aljazair.

Segalanya terasa berjalan seperti biasanya. Ia tetap bekerja layaknya tidak pernah terjadi apa-apa. Selesai bekerja, ia akan pulang ke flatnya dan mungkin akan menjumpai Salamano, seorang pria tua, tetangganya, yang suka memarahi anjingnya. Atau mungkin setelah itu ia akan mendengarkan keluh kesah Raymond Sintès dan spekulasinya akan kemungkinan kekasihnya sedang berselingkuh.

Kekosongan diri *Monsieur* Mersault ini benar-benar dapat dirasakan dari hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang dapat dikatakan istimewa. Memang, ia memiliki Marie yang notabene merupakan kekasihnya. Mereka juga sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Namun, sebenarnya *Monsieur* Mersault tidak merasa bahwa ia 'mencintai' Marie. Begitu pun hubungan dengan yang lainnya. Meski *Monsieur* Mersault juga sering berbincang dan mendengarkan keluh kesah Raymond Sintès serta sesekali memberinya beberapa pendapat, hubungan mereka tetap tidak terasa seperti hubungan pertemanan.

Karakter lain yang juga menarik untuk dibahas dalam buku ini adalah Salamano yang juga merupakan tetangga *Monsieur* Mersault. Salamano digambarkan sebagai lelaki tua yang selalu ditemani oleh anjing spaniel sejak kematian istrinya. Salamano sering sekali memperlakukan anjingnya dengan buruk. Pukulan dan makian sudah bagaikan makanan sehari-hari bagi

si anjing yang bahkan tidak memiliki nama meskipun sudah lama menemani Salamano. Salamano benar-benar memperlakukan anjingnya dengan buruk, hingga bukan sesuatu yang mengejutkan apabila suatu hari anjing tersebut hilang meninggalkan Salamano. Di sinilah Salamano digambarkan lengkap dengan keparadoksan kepribadian manusia, yang mana kemudian ia merasa sedih dan kehilangan saat anjingnya menghilang.

Selama ini, sebagian besar roman mengisahkan bagaimana si karakter utama dapat mengatasi atau dengan beruntungnya dapat menghindari permasalahan yang hadir dalam hidupnya. Namun, dalam buku ini tokoh utama tidak dapat menyadari permasalahan-permasalahan yang ditemuinya. Tokoh utama seolah tidak menyadari seberapa jauh perbuatannya saat ia membunuh seseorang dengan empat tembakan. *Monsieur* Mersault saat berada di tahanan dan menunggu putusan pengadilannya pun seakan merasa bahwa apa yang ia lakukan tidak seburuk itu dan ia tidak menyesali perbuatannya.

Pada akhirnya, peristiwa-peristiwa yang *Monsieur* Mersault lewati sebelumnya, orang-orang yang berhubungan dengannya, serta keputusan-keputusan kecil yang dipilihnya entah bagaimana bisa mengantarnya ke akhir yang tidak terduga: *guillotine*. Di hari pengumuman hukuman, *Monsieur* Mersault menyadari bahwa orang-orang yang ada di ruang pengadilan serta mungkin pula orang-orang lain di luar sana melihatnya sebagai orang asing, yaitu orang yang berada di luar definisi 'manusia' sehingga perlu untuk segera disingkirkan.

Penggambaran karakter-karakter dalam buku ini dilakukan dengan baik dan dapat dengan jelas menunjukkan kompleksitas kepribadian manusia. Tidak hanya karakter *Monsieur* Mersault, karakter lain seperti Salamano dan Raymond Sintès juga digambarkan dengan apik. Hanya saja, karakter Marie diberikan porsi yang sedikit sehingga hubungannya dengan *Monsieur* Mersault tidak begitu terasa. Sebagian besar isi buku ini diceritakan dengan ritme yang santai mengingat penceritaannya menggunakan sudut pandang karakter *Monsieur* Mersault yang tidak memiliki ambisi dalam hidupnya.

Seusai membaca buku ini, akan banyak pertanyaan dan pemikiran yang membuat kita merenung sejenak.

Akan sejauh mana kiranya hal-hal kecil yang kita putuskan, orang-orang yang kita temui, dan pilihan-pilihan yang kita ambil akan mendefinisikan diri kita?

Ketika Universitas Menjadi Suatu Komoditas

Oleh: Rama Mauliddian Panuluh

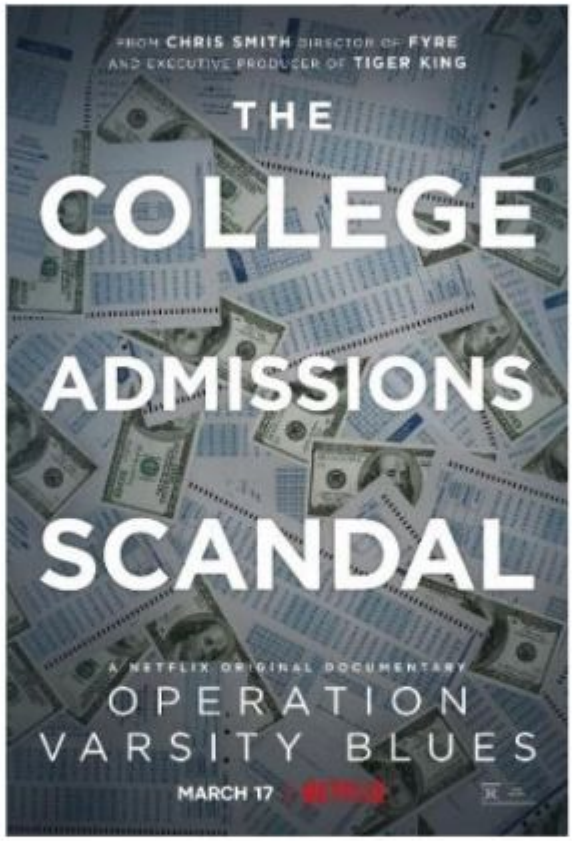

Judul: Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal

Sutradara: Chris Smith

Pemain: Matthew Modine, Roger Rignack, Jillian Peterson

Durasi: 99 menit (1 jam 39 menit)

Tayang: 17 Maret 2021 (Amerika Serikat)

Universitas dewasa ini sudah menjadi suatu komoditas, layaknya sebuah produk. Setiap universitas mengeklaim dirinya sebagai yang terbaik agar banyak peminat dan laku di pasaran. Namun, produk mereka berbeda dengan produk lainnya. Hal tersebut dikarenakan produk mereka terbatas, hanya segelintir orang yang dapat membelinya, yaitu orang yang mampu. Keterbatasan ini memiliki nilai tersendiri bagi calon pembeli. Ketika suatu produk hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, maka mereka yang bisa memilikinya akan merasa bangga. Pada akhirnya, orang rela membayar berapa pun untuk memiliki produk tersebut. Saat itu terjadi, lahirlah calo-calo yang memiliki akses untuk melakukan prapesan produk tersebut dengan membayar sejumlah uang. Dengan begitu, calon pembeli sudah mendapat jaminan untuk memilikinya bahkan sebelum produk tersebut dijual.

Hal tersebutlah yang dilakukan Rick Singer kepada orang tua calon mahasiswa agar anak mereka berkuliah di universitas terbaik di Amerika Serikat. Rick Singer merupakan dalang dibalik kasus skandal penerimaan mahasiswa yang terungkap pada tahun 2019. Perjalanan Rick Singer sebagai dalang kasus skandal tersebut diangkat menjadi film dokumenter berjudul *Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal* oleh Netflix. Aksi Rick Singer dalam memasukkan calon mahasiswa secara ilegal digambarkan dengan apik dalam film dokumenter tersebut. Film ini merupakan perpaduan antara reka adegan aksi Rick Singer, yang diperankan oleh Matthew Modine ketika melakukan skandal penerimaan perguruan tinggi (diambil dari barang bukti berupa rekaman percakapan telepon) dengan kesaksian orang yang terlibat. Selain itu, film ini juga menampilkan wawancara beberapa orang yang terlibat dan para ahli terkait. Dengan perpaduan yang tepat tersebut, film garapan sutradara Chris Smith ini berhasil menggambarkan bagaimana kasus skandal penerimaan mahasiswa itu terjadi dengan luar biasa.

Skandal penerimaan mahasiswa bermula dari kecerdikan Rick Singer yang dapat menemukan peluang bisnis dari kondisi pendidikan tinggi di Amerika Serikat, di mana universitas sudah menjadi suatu komoditas. Hal ini bisa dilihat dari pemeringkatan universitas yang dilakukan oleh *U.S. News* yang hanya mendasarkan pada satu kriteria, yaitu prestise. Maka dari itu, jangan heran jika gengsi lebih diutamakan daripada pendidikan itu sendiri. Saat ini bukan hanya pertumbuhan populasi yang membuat sulit untuk masuk suatu universitas, tetapi juga universitas itu sendiri yang membuatnya agar tampak selektif. Sebab, semakin selektif suatu universitas, semakin tinggi pula peringkat yang didapatkan. Semakin tinggi peringkatnya, semakin bergengsi bagi mahasiswa yang dapat diterima di universitas tersebut. Oleh karena itu, pendidikan tinggi telah dianggap dapat menunjukan tingkatan status seseorang. Tingkatan status seseorang sekarang dinilai dari di mana ia berkuliah.

Rick Singer, yang awalnya bekerja sebagai konsultan perguruan tinggi, memanfaatkan kondisi tersebut. Berbekal pengetahuan dan koneksi dari pekerjaan sebelumnya, ia mendirikan bisnis yang menjamin calon mahasiswa diterima di universitas impian mereka melalui –yang ia namakan– pintu samping. Singer membagi jalan untuk masuk suatu universitas menjadi tiga, yaitu pintu depan, pintu belakang, dan pintu samping. Pintu depan ialah jalan yang dapat dilalui dengan cara belajar dan mendapatkan nilai bagus saat ujian. Ini adalah jalan yang legal dan bisa dilalui oleh siapa saja, tetapi ini adalah jalan yang paling sulit. Pintu belakang ialah jalan yang dapat dilalui dengan cara memberi donasi kepada universitas yang dituju, disarankan dengan nominal sebesar puluhan juta dolar. Akan tetapi, itu tidak menjamin calon mahasiswa dapat diterima, hanya setidaknya membuat universitas tersebut "mempertimbangkan". Pintu belakang merupakan jalan yang legal dan bukan suatu rahasia, tetapi calon mahasiswa harus super kaya untuk dapat melaluinya.

Pintu yang terakhir adalah solusi bagi calon mahasiswa yang tidak sanggup melalui kedua pintu sebelumnya, yaitu pintu samping. Pintu samping merupakan jalan yang ditawarkan oleh Singer dengan hanya membayar ratusan ribu dolar, jauh di bawah harga pintu belakang, dan sudah dijamin akan diterima.

Pintu samping bisa diibaratkan seperti melakukan prapesan slot kursi suatu universitas. Target utama Singer adalah para orang tua kaya dari kalangan elite yang haus akan gengsi. Mereka adalah orang-orang yang rela membayar berapa pun asalkan statusnya naik di mata masyarakat. Pintu samping merupakan kesempatan bagi orang tua –yang dahulu tidak mampu masuk universitas bergengsi– untuk masuk melalui anak mereka. Cara kerja pintu samping ialah membuat calon mahasiswa diterima sebagai rekrutan atlet, walaupun bukan seorang atlet. Singer memanipulasi pendaftaran dengan cara membuat calon mahasiswa seolah-olah atlet yang hebat. Singer meminta orang tua mengirimkan foto anaknya yang akan didaftarkan untuk diedit agar terlihat seperti seorang atlet sungguhan. Singer juga menyuap pelatih cabang olahraga di universitas yang dituju agar membantu prosesnya. Biasanya, cabang olahraga yang dipilih ialah cabang olahraga yang sepi peminat sehingga luput dari pengawasan universitas terkait. Selain itu, Singer juga menyuap pengawas ujian agar membetulkan jawaban si calon mahasiswa untuk bisa memenuhi persyaratan nilai minimum yang diberikan universitas. Begitulah cara Singer melakukan praktiknya.

Kasus serupa bisa saja terjadi di Indonesia jika universitas-universitas menjadikan institusinya sebagai sebuah komoditas. Pendidikan bisa menjadi komoditas ketika terdapat praktik komersialisasi pendidikan pada suatu universitas. Komersialisasi pendidikan dapat terjadi ketika universitas lebih mementingkan uang daripada kewajiban untuk memberikan pendidikan ke masyarakat sebagai institusi pendidikan. Dengan begitu, tidak semua orang mampu memperoleh pendidikan yang layak.

Dengan adanya status PTN-BH –yang membuat universitas negeri dapat mengelola keuangannya sendiri– dikhawatirkan dapat membuat komersialisasi pendidikan terjadi. Ketika universitas memperoleh status PTN-BH, universitas dapat mencari pendapatan lebih dari pihak eksternal seperti investor, untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas sehingga peringkat universitas tersebut meroket. Ketika peringkat suatu universitas tinggi, peminatnya pun akan semakin banyak dan persaingan kian ketat. Persaingan yang ketat dapat meningkatkan gengsi universitas tersebut. Gengsi yang didapat oleh universitas bisa mendatangkan investor lebih banyak lagi. Hal tersebut seperti lingkaran setan yang selalu menguntungkan pihak universitas. Namun, bagi masyarakat baik kelas bawah maupun kelas atas, hal itu merupakan suatu kerugian. Sebab, semakin ketat suatu persaingan, semakin banyak pula calon-calon mahasiswa yang tidak terjangkau oleh pendidikan yang layak. Hingga pada akhirnya, masyarakat –terutama yang lebih mampu dan mempunyai privilese– akan melakukan berbagai cara, bahkan ilegal sekali pun untuk memasukkan anak mereka ke dalam universitas bergengsi, atau hanya sekadar universitas yang memiliki fasilitas pendidikan yang baik. Ketika itu terjadi, jangan berharap banyak terhadap pendidikan karena pendidikan sudah jauh menyimpang dari tujuan sejatinya, yaitu untuk meningkatkan kualitas manusia.

"Calon mahasiswa akan dijanjikan pelayanan pendidikan yang baik, meskipun pada kenyataannya mereka harus memberikan sejumlah uang yang tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan."

Harapan Tetap Mekar di Tengah Badai Kekacauan

Oleh: Tamara Diva Kamila

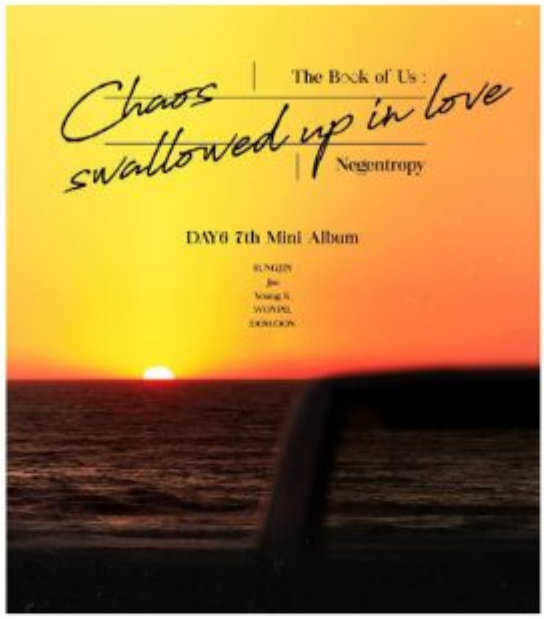

Artis: DAY6
Album: The Book of Us: Negentropy – Chaos Swallowed Up in Love
Rilis: 19 April 2021
Produser: Hong Ji Sang
Label: JYP Entertainment

Bagaimana masa pandemi Covid-19 berdampak padamu? Kuliah daring, bekerja dari rumah, pembatasan sosial, sulit bertemu teman, ujung-ujungnya hanya bisa diam di rumah dengan minim interaksi. Kesepian? Tertekan? Stres? Kecewa? Atau bahkan merasa sedang berada di ujung jurang saking frustrasinya?

Dilansir dari *Tempo.co*, menurut laporan Risiko Global 2021, yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF), 80% anak muda di seluruh dunia mengalami penurunan kondisi kesehatan mental selama pandemi Covid-19. Sementara di Indonesia, data yang dihimpun oleh layanan *telemedicine* Halodoc menunjukkan konsultasi terkait kesehatan mental di platform tersebut meningkat hingga 300% selama pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya kesehatan fisik saja yang tengah diserang selama pandemi, tetapi juga kesehatan mental.

Menjawab kegelisahan kita, DAY6 menyuguhkan album terbaru mereka yang bertajuk *The Book of Us: Negentropy – Chaos Swallowed Up in Love*. Album tersebut mengusung tema "Energi yang akhirnya memulihkan kita adalah cinta dan melalui cinta kita menjadi satu".

Di kondisi yang sedang terpuruk ini, kita harus tetap berjuang. Apa pun yang terjadi kita harus bisa melalui semua ini. Meskipun berat, kita harus terus berusaha agar kelak dapat merasakan kebahagiaan. Supaya tetap teguh dan waras, kita membutuhkan pendukung. Bahasa gaulnya, *support system*—orang yang mendukung, membantu, dan bersedia mendengar keluh kesah kita. Hal ini tergambarkan pada potongan lirik lagu berjudul "You Make

Me" yang menjadi lagu utama DAY6 pada album *Negentropy* berikut.

Nega eopseotdamyeon da bulganeunghal geoya
(Tanpamu itu tidak mungkin)
Jigeumui nan itjido aneul geoya
(Tanpamu aku takkan ada di sini)
Neoraseo nal ireukineun geoya
(Kaulah yang mengangkatku)
So I'm alright
(Jadi aku baik-baik saja)
Ireoke beotijana
(Lihat aku, aku bertahan)
Han baljjak han baljjak balgeoreumeul ieo ga
(Selangkah demi selangkah, aku terus melangkah)
Han baljjak han baljjak mugeowodo ieo ga
(Selangkah demi selangkah meskipun berat kutetap melangkah)

Di video musik "You Make Me", sosok *support system* dilambangkan sebagai kekasih. Namun, orang yang bersedia mendukung, mencintai, dan menyayangimu itu tidak melulu pasangan, kan? Sosok ini bisa saja bagian dari keluarga, kerabat, juga teman. Nah, ketika kamu memiliki seseorang yang tiba-tiba menghubungi dan menanyakan kabar, jangan di-*skip*, ya! Bisa jadi, dia sedang mengkhawatirkanmu dan ingin membantumu. Jangan sampai kamu menyia-nyiakan orang ini kemudian menyesal di kemudian hari.

Selain itu, lagu "You Make Me" seakan-akan mengajak kita untuk lebih peka terhadap sekitar. Kita diajak membuka mata dan merangkul orang-orang yang membutuhkan dukungan. Maka dari itu, cobalah sesekali kamu mengecek daftar kontak lalu menghubungi kawan lama. Tanyakan kabarnya dan dengarkan jika dia membutuhkan teman curhat. Kamu bisa membantunya meskipun hanya berupa dukungan moril. Atau kalau kamu mampu, kamu juga bisa memberinya dukungan materiel. Tapi ingat ya, karena sedang pandemi, tidak boleh bertemu langsung jika tidak begitu mendesak!

Nochi mara jwo
(Jangan lepaskan aku)
Nega itdaneun ge, naegeneun majimak huimang
(Karena bagiku, kaulah cahaya harapan terakhirku)
Han julgiui bichinikka
(Satu-satunya cahayaku yang bersinar)
Butjaba jwo
(Tetaplah bersamaku)
Sara itdaneun ge duryeopgo beogeopgin
(Hidup itu menakutkan dan berat)
Hajiman gyeondil su isseo oroji neoui geu sarangi itdamyeon
(Tapi kubisa melewatinya selama aku memiliki cintamu)

Dari penggalan lirik di atas, apakah kamu menyadari kalau kehadiranmu itu bisa jadi sangat berarti bagi orang lain? Kamu hadir saja sudah membahagiakan, apalagi kalau kamu bersedia memberinya dukungan, ya kan? Ingat, manusia itu makhluk sosial. Kita harus saling membantu, memberi motivasi, memberi dukungan, dan tentu saja selalu menebar kebaikan. Siapa tahu, kebaikan kecilmu itu bisa membantu teman yang sedang mengalami stres di saat pandemi, *lho*. Bahkan bagi seorang introver sekalipun, interaksi dengan orang lain sangatlah dibutuhkan. Tidak apa-apa meskipun hanya via daring, melalui telepon, *video call*, atau hanya saling membalas pesan. Namun, hal itu lebih baik daripada tidak sama sekali, bukan?

Selain "You Make Me" yang mengangkat cerita tentang mekarnya harapan di tengah kesulitan, lagu-lagu lain di album *Negentropy* juga mengusung cerita yang menarik. "Everyday We Fight", menggambarkan cara bertengkar, berdamai, dan jujur dengan orang yang kita sayangi. "Healer", membandingkan kenyamanan cinta dengan penyembuhan ajaib ketika sulit dan tertekan. "Neither Two" bercerita tentang *true love*. "One", menceritakan bahwa kebersamaan dapat mengatasi masalah sesulit apa pun. "On The Clouds", berisi harapan agar mereka yang telah meninggal dapat berbahagia. Album ini ditutup dengan lagu "Let's Love More in The Future" yang mengisahkah cara mengatasi konflik dan luka, lalu menarik hati untuk mencintai lagi.

Album *The Book of Us: Negentropy* ini menjadi bagian terakhir dari seri album DAY6 bertajuk *The Book* yang memiliki akhir bahagia. Hadirnya album yang menggambarkan kebutuhan manusia akan orang lain, cinta, harapan, dan motivasi ini di tengah pandemi semoga dapat memberi penghiburan tersendiri bagi penikmat musik dan orang-orang yang sedang berjuang. Semoga saja pandemi Covid-19 segera berakhir sehingga melengkapi akhir cerita album ini, yaitu *ending* yang bahagia.

Kiblat Status Baru Kampus

Oleh: Zulzfaa Afiifah

Gambar: Rozaq Nur Hidayat

"Pada tanggal 6 Oktober 2020, Presiden Jokowi telah menandatangani PP UNS PTN-BH." Sepenggal ucapan Rektor Jamal kala jumpa pers tempo lalu berhasil membuat saya yang awalnya tidak ingin tahu lebih dalam menjadi ditimpa kemelitan. Menurut Mulyandani (2021), PTN-BH merupakan perguruan tinggi yang memiliki entitas hukum yang mandiri, transparan dan akuntabel, serta memiliki kemandirian dalam bidang akademik dan nonakademik. Status baru dengan tuntutan delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini tentu menjadi tantangan yang tidak bisa dianggap sepele oleh Universitas Sebelas Maret.

Mulai dari penerimaan peserta didik baru yang menjadi 50% untuk jalur Mandiri, yang seolah-olah hanya demi komersialisasi kampus, hingga membuat para pejuang pendidikan lanjut jalur SBMPTN menuju kampus biru ini menjadi resah, terutama bagi mereka dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Keadaan ini seakan mengecilkan hati mereka untuk memperbaiki kualitas diri dan hidup. Tujuan serta harapan yang sudah dimantapkan pun kini kembali meragu dan ciut.

Mimpi mereka makin mirip angin, tak terlihat, hanya berlalu sekilas tanpa bisa digenggam. Kalaupun mereka berhasil terdaftar sebagai "mahasiswa" di kampusku ini, beban di pundak mereka akan sungguh berat, layaknya Raju dalam film *3 Idiots*. Kekhawatiran akan nasib keuangan keluarga hingga harapan yang tinggi pada dirinya, bukan tidak mungkin menjadi tekanan yang akan memengaruhi produktivitasnya di dunia perkuliahan.

Kalau dipikir-pikir, kampusku ini mulai berubah sejak menyandang "status" baru itu.

Gambar: Rozaq Nur Hidayat

Belum lagi mengenai aset kampus. Aset perguruan tinggi memang sangat penting untuk menunjang operasional kegiatan kampus, baik dalam bidang akademik maupun nonakademik. Bata demi bata mulai disusun untuk menambah beberapa aset yang "dirasa" dibutuhkan. Rumor pembangunan SPBU dan Tower kampus cukup membuat gempar. Dalam hati saya pun bertanya, "Apakah bangunan-bangunan itu memang kami butuhkan?" Sederhananya, tengok saja satu per satu fakultas yang ada di kampus, terlihat jelas ada kesenjangan kualitas di antara mereka. Mulai dari ruang-ruang kelas dengan kapasitas yang sungguh bertolak belakang hingga beberapa fasilitas sederhana seperti lahan parkir dan kamar mandi. Bukankah perbaikan penunjang suasana belajar tersebut yang lebih dibutuhkan mahasiswa?

Selain hal-hal di atas, beredar pula rumor tentang "militer masuk kampus". Hal ini kembali membuat saya ragu, ragu akan menguntungkan para angkatan bersenjata itu di dalam kampus. Setahu saya, memang mereka ditugaskan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Akan tetapi, tidak pernah terpikirkan sekali pun dalam benak saya, bahwa sebagai mahasiswa, saya akan dilindungi sedekat itu oleh para angkatan bersenjata. Saya merasa kita bagaikan anak pejabat yang mungkin saja dapat dibunuh atau diculik sewaktu-waktu. Di sisi lain, saya juga merasa, kita para mahasiswa, sebagai salah satu yang mungkin akan mengancam bangsa. Boleh jadi, ilmu yang kita dapat di kampus bisa setiap saat kita salah gunakan untuk menghancurkan bangsa sehingga harus diawasi dan dijaga saat sedang menuntut ilmu.

Beberapa rumor dan dampaknya itu membuat saya kembali mempertanyakan arah dan tujuan kampus dengan status baru PTN BH ini. Tiba-tiba semua serba baru dan menggegerkan.

SALURAN SEBELAS
Mengungkap Fakta, Menebar Makna

KINI HADIR DALAM TAMPILAN BARU

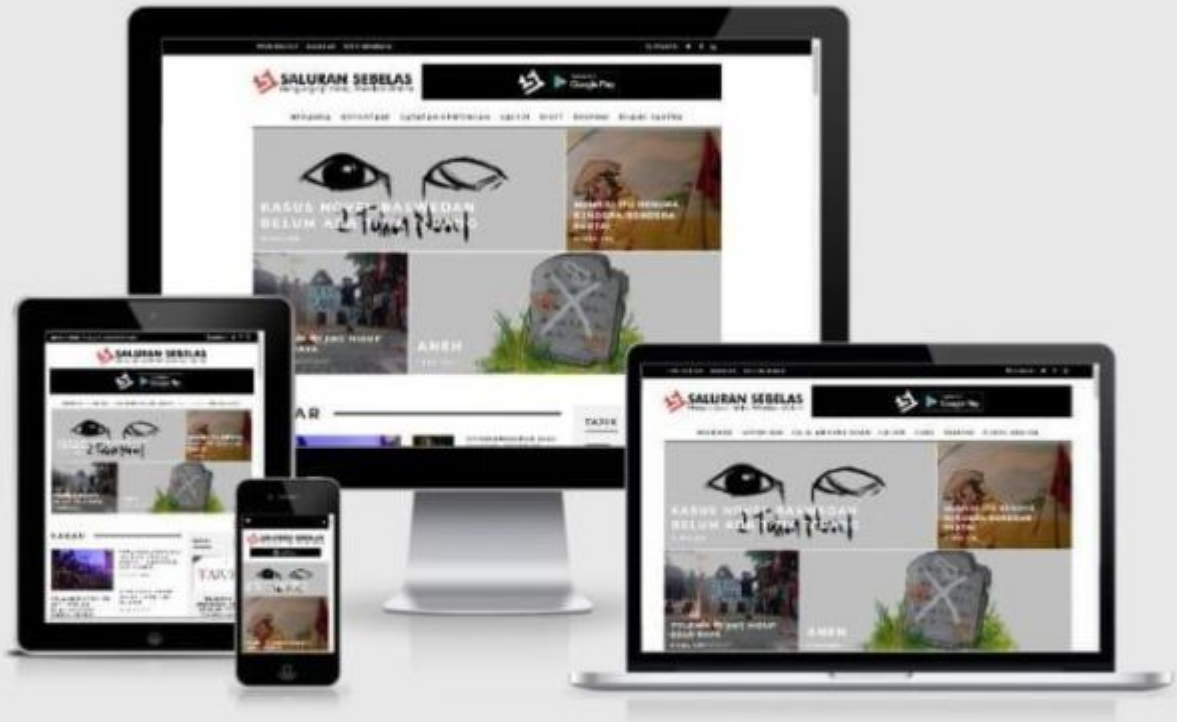

TEMUKAN DI
Google Play

LPM Kentingan
Gd. Graha UKM UNS Lt. 2, Jl. Ir. Sutami
No. 36A Kentingan, Jebres, Kota Surakarta
Surel: email@saluransebelas.com
Laman: saluransebelas.com